



LAPORAN KINERJA

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN

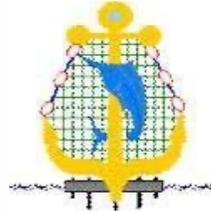
TAHUN 2023

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA

PENGAMBENGAN

2023

LEMBAR PENGESAHAN



LAPORAN KINERJA (LKj)

TAHUN 2023

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN

Jembrana, 15 Januari 2024

Disetujui oleh :

Penanggung Jawab,
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Pengambangan



Andi Mannoengi

Disusun oleh :

Ketua Tim
Kepala Sub Bagian Umum



Lukman Hadi

KATA PENGANTAR

Mengacu pada RPJMN 2021 – 2024 dan RKT Tahun 2023, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan senantiasa mengupayakan seluruh rencana aksi yang ada dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien, sebagaimana mestinya dengan harapan target indikator kinerja yang terdapat pada RPJMN dan RKT dapat tercapai dengan maksimal dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi Ditjen Perikanan Tangkap kepada publik dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian pada Tahun 2023 merupakan pencapaian yang dijadikan dasar (base line) untuk menetapkan target pada tahun – tahun berikutnya yang kemungkinan besar akan berdampak pada reviu beberapa dokumen perencanaan Tahun 2024 namun akan konsisten hingga akhir RPJMN di tahun 2024. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan Tahun 2023 ini disertai dengan Data Dukung Capaian sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pelaporan kinerja ini.

Kami berharap apa yang disajikan dalam Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan Tahun 2023 ini dapat menjadi masukan kepada seluruh pihak terkait dalam memahami proses pelaksanaan tugas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan pada Tahun 2023.

Jembrana, 15 Januari 2024

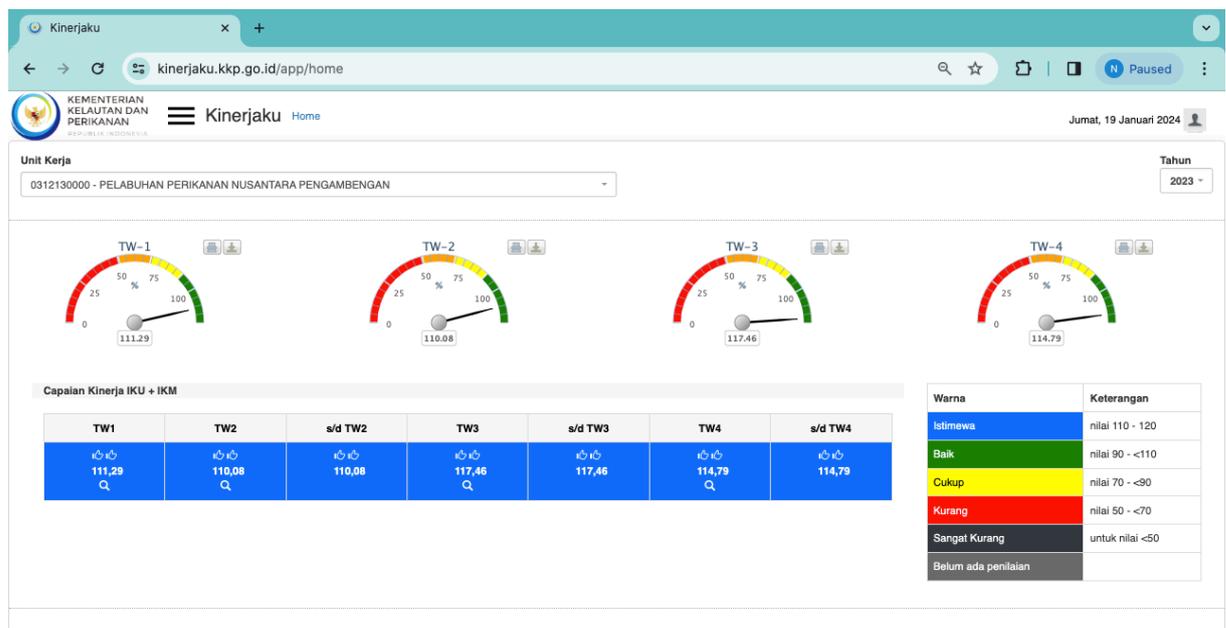
Kepala Pelabuhan



Andi Mannnojengi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2023 menyajikan capaian strategis organisasi yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan target sebesar Rp. 18.125.313.000- yang terealisasi sebesar, Rp 17.876.690.119 - atau 98,63 % dari total pagu pada Tahun 2023. Sedangkan secara kinerja dengan hasil capaian sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dan dapat memenuhi target dengan Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambahkan dengan Nilai Indikator Kinerja (IK) sebesar **114,79%**. (Sesuai dashboard pada Aplikasi Kinerjaku pada Gambar 1)



Gambar 1. Dashboard pada aplikasi Kinerjaku Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Triwulan IV Tahun 2023

Dari hasil pengukuran kinerja Ditjen Perikanan Tangkap dan UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2023 melalui pencapaian target indikator kinerja yang di input ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh hasil seluruh indikator yang memenuhi target yaitu sebagai berikut :

1. IKS.01.01 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Rp Juta)
2. IKS.02.02 Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengambangan (Ton)
3. IKS.03.01 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengambangan (Persen)
4. IKS.03.02 Tingkat Kinerja PPN Pengambangan (Nilai)
5. IKS.03.03 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Persen)
6. IKS.04.01 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Persen)
7. IKS.04.02 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Nilai)
8. IKS.05.01 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)
9. IKS.06.01 Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)
10. IKS.07.01 Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Nilai)
11. IKS.07.02 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Persen)
12. IKS.07.03 Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Nilai)
13. IKS.07.04 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Indeks)
14. IKS.07.05 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Persen)
15. IKS.07.06 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Persen)
16. IKS.07.07 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Nilai)

17. IKS.07.08 Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
18. IKS.07.09 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)

Pengukuran kinerja berbasis BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian output) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian outcome). Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum	2
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Struktur Organisasi	4
E. SDM Aparatur PPN Pengambengan	6
F. Sistematika Penyajian	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Pembangunan Nasional Visi Presiden	11
B. Pembangunan Kelautan dan Perikanan Visi KKP	13
C. Pembangunan Perikanan Tangkap	14
D. Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	22
E. Rencana Aksi Penetapan Kinerja	25
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja Organisasi	29
B. Akuntabilitas Keuangan	85
BAB IV. PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93

DAFTAR TABEL

TABEL 1 Komposisi Pegawai Pelabuhan Tahun 2023	7
TABEL 2 Komposisi Pegawai Pelabuhan.....	7
TABEL 3 Rekapitulasi Pegawai Pelabuhan Tahun 2023	8
TABEL 4 Tabel Informasi Cascading	20
TABEL 5 Target Kinerja Pelabuhan	22
TABEL 6 Komposisi Target dan Realisasi Pagu Anggaran.....	24
TABEL 7 Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023	26
TABEL 8 Rincian Capaian Indikator PNBPN	30
TABEL 9 Perbandingan dengan Satker Lain.....	31
TABEL 10 Realisasi anggaran mendukung IKU.....	32
TABEL 11 Rincian Capaian Indikator Volume Produksi.....	33
TABEL 12 Perbandingan dengan Satker Lain.....	34
TABEL 13 Realisasi anggaran mendukung IKU.....	35
TABEL 14 Rincian Capaian Indikator Permohonan Pengusahaan	36
TABEL 15 Perbandingan dengan Satker Lain.....	37
TABEL 16 Realisasi anggaran mendukung IKU.....	38
TABEL 17 Rincian Capaian Indikator Tingkat Kinerja	39
TABEL 18 Perbandingan dengan Satker Lain.....	40
TABEL 19 Realisasi anggaran mendukung IKU.....	41
TABEL 20 Rincian Capaian Indikator Pelayanan Kesyahbandaran.....	42
TABEL 21 Perbandingan dengan Satker Lain.....	43
TABEL 22 Realisasi anggaran mendukung IKU.....	44
TABEL 23 Rincian Capaian Indikator Pengendalian Pengembangan.....	46
TABEL 24 Perbandingan dengan Satker Lain.....	47
TABEL 25 Realisasi anggaran mendukung IKU.....	47
TABEL 26 Rincian Capaian Indikator Pengendalian Lingkungan	49
TABEL 27 Perbandingan dengan Satker Lain.....	50
TABEL 28 Realisasi anggaran mendukung IKU.....	50
TABEL 29 Rincian Capaian Indikator Kapal Perikanan.....	52
TABEL 30 Perbandingan dengan Satker Lain.....	53
TABEL 31 Realisasi anggaran mendukung IKU.....	54
TABEL 32 Rincian Capaian Indikator Pengetahuan Kompetensi.....	56

TABEL 33 Perbandingan dengan Satker Lain.....	57
TABEL 34 Realisasi anggaran mendukung IKU.....	58
TABEL 35 Rincian Capaian Indikator Nilai ZI WBK.....	61
TABEL 36 Perbandingan dengan Satker Lain.....	61
TABEL 37 Realisasi anggaran mendukung IKU.....	62
TABEL 38 Rincian Capaian Indikator Rekomendasi Hasil Pengawasan .	63
TABEL 39 Perbandingan dengan Satker Lain.....	64
TABEL 40 Realisasi anggaran mendukung IKU.....	65
TABEL 41 Rincian Capaian Indikator Rekonsiliasi Kinerja.....	66
TABEL 42 Perbandingan dengan Satker Lain.....	67
TABEL 43 Realisasi anggaran mendukung IKU.....	67
TABEL 44 Rincian Capaian Indikator IP ASN	68
TABEL 45 Perbandingan dengan Satker Lain.....	69
TABEL 46 Realisasi anggaran mendukung IKU.....	69
TABEL 47 Rincian Capaian Indikator Kepatuhan Barang/Jasa	70
TABEL 48 Perbandingan dengan Satker Lain.....	73
TABEL 49 Realisasi anggaran mendukung IKU.....	74
TABEL 50 Rincian Capaian Indikator Kepatuhan Pengelolaan BMN.....	75
TABEL 51 Perbandingan dengan Satker Lain.....	76
TABEL 52 Realisasi anggaran mendukung IKU.....	77
TABEL 53 Rincian Capaian Indikator Nilai IKPA.....	78
TABEL 54 Perbandingan dengan Satker Lain.....	79
TABEL 55 Realisasi anggaran mendukung IKU.....	79
TABEL 56 Rincian Capaian Indikator Kinerja Anggaran	81
TABEL 57 Perbandingan dengan Satker Lain.....	81
TABEL 58 Realisasi anggaran mendukung IKU.....	82
TABEL 59 Rincian Capaian Indikator Survei Kepuasan Masyarakat.....	83
TABEL 60 Perbandingan dengan Satker Lain.....	83
TABEL 61 Realisasi anggaran mendukung IKU.....	84
TABEL 62 Pagu Anggaran	85
TABEL 63 Realisasi Keuangan	88

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 Dashboard Pada Aplikasi Kinerjaku.....	iv
GAMBAR 2 Struktur Organisasi Pelabuhan	6
GAMBAR 3 Dashboard Pada Aplikasi Kinerjaku.....	93

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap yakni meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Enam kegiatan utama yang dilakukan yakni (1) pengelolaan sumberdaya ikan, (2) pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan, (3) pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan, (4) pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil, (5) pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib dan berkelanjutan, dan (6) peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis.

Pelabuhan Perikanan merupakan tempat yang sangat strategis dan berperan sebagai rumah atau basis utama dalam melaksanakan berbagai program kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap maupun tempat untuk mengimplementasikan peraturan perundangan yang berlaku pada lingkup KKP yang didasari 3 pilar Misi **KKP yaitu Kedaulatan (Sovereignty), Keberlanjutan (Sustainability) dan Kesejahteraan (Prosperity)**. Oleh karena itu, di dalam kawasan Pelabuhan harus tercipta suasana aman, nyaman dan kondusif agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan secara baik.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (clean governance) dan bertanggungjawab (good governance) diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara *akuntable* sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan-

permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang.

Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni: (1) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai serta (2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Wujud pelaporan kinerja dimaksud adalah Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan yang disusun setiap tahun. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan disusun oleh setiap unit kerja yang menyusun perjanjian kinerja yakni dengan menyajikan informasi tentang ; (1) uraian singkat tentang unit kerja, (2) rencana dan target kinerja yang ditetapkan oleh unit kerja dengan atasan unit kerja, (3) pengukuran kinerja, dan (4) evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program dan kegiatan serta kondisi terakhir yang seharusnya. Oleh karena itu, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan setiap tahunnya telah melakukan penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana format yang telah ditetapkan. Ukuran keberhasilan dilakukan melalui pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang dapat menggambarkan kinerja utama Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan

2. Gambaran Umum

Pembangunan perikanan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Prasarana pelabuhan perikanan mempunyai andil yang cukup besar dalam menentukan keberhasilan pembangunan perikanan tangkap. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam usaha pengembangan usaha perikanan tangkap yaitu sebagai pusat atau sentral kegiatan perikanan terutama yang berada di wilayah Kota Jembrana Provinsi Bali. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan selain merupakan penghubung antara nelayan dengan pengguna hasil perikanan laut, baik pengguna langsung maupun tidak langsung seperti pedagang, pabrik pengolah dan lain-lain, juga merupakan tempat berinteraksinya berbagai kepentingan masyarakat pantai yang bertempat di sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan. Selain itu Pelabuhan Perikanan juga merupakan titik temu (terminal point) yang menguntungkan antara kegiatan ekonomi di laut dengan kegiatan ekonomi darat.

3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pelabuhan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dalam hal ini dipimpin oleh seorang kepala Pelabuhan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan menyelenggarakan fungsinya:

1. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelabuhan perikanan;
2. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
3. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
4. Pelaksanaan pemeriksaan Log Book;
5. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
6. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
7. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
8. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
9. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
10. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
11. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
13. Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
14. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan

Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan tersebut pelabuhan perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi pemerintahan yaitu fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan. Serta fungsi lainnya yang terkait dengan pengelolaan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pemerintahan tersebut meliputi: Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan; Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan; Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan; Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan; Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan; Pelaksanaan kesyahbandaran; Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan; Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan; Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan; Pemantauan wilayah pesisir; Pengendalian lingkungan; Kepabeanaan; dan/atau keimigrasian.

2. Fungsi pengusaha yaitu fungsi untuk melaksanakan pengusaha berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan yang meliputi : Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan; Pelayanan bongkar muat ikan; Pelayanan pengolahan hasil perikanan; Pemasaran dan distribusi ikan; Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan; Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan; Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan; Wisata bahari; dan/atau Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan fungsi tersebut, dengan memperhatikan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maka pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab masing-masing eselon-I lingkup KKP yang berkaitan dengan kebijakan di daerah secara implisit juga menjadi tugas dan fungsi pelabuhan perikanan.

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengembangan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 66/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan merupakan Eselon III meliputi posisi jabatan sebagai berikut:

1. Sub Koordinator Kelompok Tata Usaha, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan anggaran, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan dan umum, pelaksanaan pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja), rumah tangga dan Barang Milik Negara, pelayanan masyarakat perikanan, melakukan penyiapan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.
2. Sub Koordinator Kelompok Operasional Pelabuhan dipimpin oleh Subkoordinatif Operasional Pelabuhan yang memiliki tugas dan fungsinya yaitu melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan data, informasi, publikasi, inspeksi pembongkaran ikan, bimbingan teknis, dan penerbitan Sertifikat CPIB.
3. Sub Koordinator Kelompok Kesyahbandaran, dipimpin oleh Subkoordinatif Kesyahbandaran mempunyai tugas dan fungsinya melakukan pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan, pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapar, pemeriksaan *Log Book*, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, pengawasan pengisian bahan bakar, bimbingan teknis serta kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Sub Koordinator Kelompok Tata Kelola dan Pelayanan Usaha, yang dipimpin oleh Subkoordinatif Tata Kelola dan Pelayanan Usaha mempunyai tugas dan fungsinya yaitu melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana; bimbingan teknis; serta fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan, melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan jasa seperti sewa alat berat, sewa lahan, jasa kebersihan, pas harian/berlangganan, penerbitan rekomendasi pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha, serta bimbingan teknis pelayanan usaha.
5. Kelompok Jabatan Fungsional, Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional kepelabuhanan serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan Fungsional pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan terdiri

dari Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda, Pranata Komputer Muda, dan Pranata Keuangan APBN Penyelia.



Gambar 2. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan

5. SDM Aparatur PPN Pengembangan

Berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan, serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan didukung oleh 72 orang pegawai yang terdiri dari PNS sebanyak 34 orang, PPPK sebanyak 16 orang dan Pramubakti sebanyak 22 orang berasal dari berbagai bidang keahlian. Seluruh SDM di pelabuhan perikanan ini merupakan aset untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Komposisi Pegawai Pelabuhan Tahun 2023 Berdasarkan Golongan

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Pelabuhan	-	-		1	1
2.	Subbagian Umum	-	-	1	-	1
	JFT/Pelaksana Sub Bagian Umum	-	2	8	-	10
3.	Sub Kelompok Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	-	1	-	1
	JFT/Pelaksana Sub Kelompok Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	2	-	-	2
4.	Sub Kelompok Kerja Operasional Pelabuhan	-	-	1	-	1
	JFT/Pelaksana Sub Kelompok Kerja Operasional Pelabuhan	-	1	6	-	7
5.	Sub Kelompok Kerja Kesyahbandaran	-	-	1	-	1
	JFT/Pelaksana Sub Kelompok Kerja Kesyahbandaran	-	1	3	-	4
6.	Jabatan Fungsional Tertentu					
	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Muda)	-	-	3	-	3
	Pranata Komputer (Muda)	-	-	1	-	1
	Perencana (Muda)	-	-	1	-	1
	Pranata Keuangan APBN (Penyelia)	-	-	1	-	1
7.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	-	-	-	16
8.	Pegawai Pramubakti	-	-	-	-	22
Jumlah						72

Tabel 2. Komposisi Pegawai Pelabuhan Tahun 2023 Berdasarkan Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan				Jumlah
		SMA	DIII	S1/DIV	S2	
1.	Kepala Pelabuhan	-	-	-	1	1
2.	Subbagian Umum	-	-	1	-	1
	JFT/Pelaksana Sub Bagian Umum	1	2	7	-	10
3.	Sub Kelompok Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	-	1	-	1
	JFT/Pelaksana Sub Kelompok Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	2	-	-	-	2

4.	Sub Kelompok Kerja Operasional Pelabuhan	-	-	-	1	1
	JFT/Pelaksana Sub Kelompok Kerja Operasional Pelabuhan	-	2	5	-	7
5.	Sub Kelompok Kerja Kesyahbandaran	-	-	1	-	1
	JFT/Pelaksana Sub Kelompok Kerja Kesyahbandaran	-	1	3	-	4
6.	Jabatan Fungsional Tertentu					
	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Muda)	-	-	3	-	3
	Pranata Komputer (Muda)	-	-	1	-	1
	Perencana (Muda)	-	-	1	-	1
	Pranata Keuangan APBN (Penyelia)	-	-	1	-	1
7.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	8	1	5	-	16
8.	Pegawai Pramubakti	16	1	6		22
Jumlah						72

Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai Pelabuhan Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kepala Pelabuhan	1	-	1
2.	Subbagian Umum	1	-	1
	JFT/Pelaksana Sub Bagian Umum	2	8	10
3.	Sub Kelompok Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	1	1
	JFT/Pelaksana Sub Kelompok Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	2	-	2
4.	Sub Kelompok Kerja Operasional Pelabuhan	1	-	1
	JFT/Pelaksana Sub Kelompok Kerja Operasional Pelabuhan	4	3	7
5.	Sub Kelompok Kerja Kesyahbandaran	1	-	1
	JFT/Pelaksana Sub Kelompok Kerja Kesyahbandaran	3	1	4
6.	Jabatan Fungsional Tertentu			
	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Muda)	1	2	3

	Pranata Komputer (Muda)	1	-	1
	Perencana (Muda)	1	-	1
	Pranata Keuangan APBN (Penyelia)	-	1	1
7.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	9	7	16
8.	Pegawai Pramubakti	15	7	22
Jumlah				72

6. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini bertujuan menginformasikan capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2023. Capaian Kinerja (*Performance Results*) s/d Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Target Tahunan Perjanjian Kinerja (*Performance Plan*) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun kaitan dari sistematika penyajian Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2023 sebagai berikut:

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Bab ini disajikan ringkasan secara menyeluruh Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan.

2. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini di sajikan informasi umum tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi serta Sistematika Laporan.

3. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini, menguraikan secara singkat mengenai visi, misi dan ringkasan perjanjian kinerja Tahun 2023.

4. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini, menguraikan capaian kinerja organisasi (membandingkan antara target dan realisasi tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi, Analisa penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan) serta realisasi anggaran.

5. BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

6. LAMPIRAN

Isi dari pada lampiran merupakan kumpulan dari Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Pembangunan Nasional Visi Presiden

- **Visi Presiden**

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi pembangunan nasional 2021-2024 akan menggunakan Visi Presiden yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkeperibadian, berlandaskan Gotong Royong". Visi ini diartikan dimana saat Indonesia telah sungguh-sungguh berdaulat, mandiri, dan berkeperibadian yang diwujudkan dengan kerja gotong royong, maka saat itulah Indonesia telah menjadi Indonesia maju sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang tertuang pada pembukaan UUD 1945.

- **Misi Presiden**

Misi Presiden diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu sebagai berikut:

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Mengembangkan Sistem Jaringan Gizi dan Tumbuh Kembang Anak
- Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan
- Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan
- Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- Menumbuhkan Kewirausahaan
- Memperkuat Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Misi 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila
- Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur
- Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0
- Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru
- Mempertajam Reformasi Struktural dan Fiskal
- Mengembangkan Reformasi Ketenagakerjaan

Misi 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

- Redistribusi Aset Demi Pembangunan Berkeadilan
- Mengembangkan Produktivitas dan Daya Saing UMKM Koperasi
- Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan

- Mengembangkan Reformasi Sistem Jaminan Perlindungan Sosial
- Melanjutkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan Di pedesaan
- Mempercepat Penguatan Ekonomi Keluarga
- Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah Untuk Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

- Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi
- Mitigasi Perubahan Iklim
- Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup

Misi 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa

- Pembinaan Ideologi Pancasila
- Revitalisasi Revolusi Mental
- Restorasi Toleransi dan Kerukunan Sosial
- Mengembangkan Pemajuan Seni-Budaya
- Meningkatkan Kepeloporan Pemuda dalam Pemajuan Kebudayaan
- Mengembangkan Olahraga untuk Tumbuhkan Budaya Sportifitas dan Berprestasi

Misi 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

- Melanjutkan Penataan Regulasi
- Melanjutkan Reformasi Sistem dan Proses Penegakan Hukum
- Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM
- Mengembangkan Budaya Sadar Hukum

Misi 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga

- Melanjutkan Haluan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif
- Melanjutkan Transformasi Sistem Pertahanan yang Modern dan TNI yang Profesional
- Melanjutkan Reformasi Keamanan dan Intelijen Yang Profesional dan Terpercaya

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya

- Aktualisasi Demokrasi Pancasila
- Mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional

- Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Birokrasi
- Reformasi Kelembagaan Birokrasi Yang Efektif dan Efisien
- Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Reformasi Pelayanan Publik

Misi 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

- Menata Hubungan Pusat Dan Daerah Yang Lebih Sinergi
- Meningkatkan Kapasitas Daerah Otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa dalam Pelayanan Publik dan Peningkatan Daya Saing Daerah
- Mengembangkan Kerjasama Antar Daerah Otonom dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru

- **Tujuan Pembangunan Nasional**

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

B. Pembangunan Kelautan dan Perikanan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi KKP 2021-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkeperibadian, berlandaskan Gotong Royong”.

- **Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan Misi Presiden dalam RPJMN 2021-2024, KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden yaitu:

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Peningkatan Daya Saing SDM KP
- Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional

Misi 3. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Misi 4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

- **Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan**

Menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

- 1. Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan, yakni:**
 - a. Mengembangkan kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan Perikanan
 - b. Mengembangkan inovasi dan riset kelautan dan perikanan
- 2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional, yakni:**
 - a. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan perikanan tangkap
 - b. Meningkatkan mutu, daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan
- 3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yakni:**
 - a. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati,
 - b. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
 - c. Mengembangkan sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
- 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP,yakni:**
 - a. Meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi KKP

C. Pembangunan Perikanan Tangkap

- **Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

Visi Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2021-2024 adalah “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkeperibadian berlandaskan Gotong- Royong”.

- **Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

Ditjen Perikanan Tangkap melaksanakan 4 (empat) Misi Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Penumbuhan Kewirausahaan Masyarakat Perikanan Tangkap
- Penguatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Tangkap Perempuan

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Peningkatan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur Perikanan Tangkap
- Melanjutkan Revitalisasi Industri Perikanan Tangkap dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0

Misi 3. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Ekosistem Sumber Daya Perikanan
- Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup Sumberdaya Perikanan

Misi 4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap

- **Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah :

1. Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap

yaitu peningkatan pemahaman, kapasitas, serta inisiatif inovasi masyarakat perikanan tangkap; dilakukan melalui pendampingan/fasilitasi usaha, diversifikasi usaha, pemberdayaan/perindungan masyarakat perikanan tangkap, serta pengarusutamaan gender.

2. Membangun Struktur Ekonomi Perikanan Tangkap Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

yaitu pembangunan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing pada sub bidang perikanan tangkap, melalui pengelolaan sumber daya perikanan berbasis industrialisasi; peningkatan produktivitas sarana prasarana penangkapan, peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan, serta implementasi keterpaduan sistem logistik ikan di pelabuhan perikanan.

3. Mencapai Lingkungan Hidup Sumberdaya Perikanan Yang Berkelanjutan

yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup pada sub bidang perikanan tangkap

yang mencakup pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); penerapan harvest strategy, alokasi izin usaha berbasis alokasi sumber daya ikan, penggunaan sarana prasarana penangkapan ramah lingkungan, serta implementasi konsep eco-infrastructure

4. Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya di Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

yaitu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi DJPT yang berkualitas, mencakup penataan kerangka kebijakan, profesionalisme ASN, keterbukaan perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui implementasi komunikasi berbasis sistem informasi 4.0.

Berdasarkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap diturunkan ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan sebagai berikut:

1. Sebagai “Sentra Usaha Mina” artinya bahwa Wilayah PPN Pengambangan Jembrana merupakan sentral bagi kegiatan-kegiatan perikanan dari 5 (lima) TPI (Tempat Pendaratan Ikan) yang ada di Kota Jembrana sepanjang garis pantai 76 km, yang akhirnya akan menjadi Infrastruktur dari Industri Perikanan di masa mendatang.
2. “Yang Berdaya Saing” artinya Hasil Produksi/Tangkapan PPN Pengambangan mempunyai daya mutu yang berkualitas ekspor dikarenakan sangat menjaga nilai mutu sehingga Produk Perikanan yang dipasarkan stabil. Pada Tahun 2014 Indonesia sudah mencapai tingkat kesuksesan yang mencakup kawasan Pelabuhan tidak hanya sebagai Tempat Pendaratan Ikan, tetapi juga meliputi Penangkapan Ikan, Pelelangan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan. Di dalam kawasan Pelabuhan Perikanan ke depannya diharapkan adanya industri/perusahaan yang bergerak dalam penyediaan sarana produksi perikanan yang berwawasan pengolahan sumberdaya ikan yang berkelanjutan di mana dalam pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan harus memperhatikan dampak akibat dari pemanfaatan yang berlebihan sehingga ikan tidak punah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, diperlukan langkah – langkah sebagai berikut:

1. Dengan pelayanan prima diharapkan para masyarakat /nelayan /stakeholder menerima kemudahan segala kebutuhannya yang sesuai dengan pelayanan yang

disediakan di PPN Pengambengan Jembrana

2. Pelabuhan sebagai kluster perikanan sekaligus pusat pertumbuhan industri perikanan terpadu hal ini dimaksudkan untuk memudahkan para nelayan-nelayan kecil membuka pasar ekonomi dimana akan terjadi transaksi secara menyeluruh dalam satu lokasi yaitu dialokasikan pada PPN Pengambengan Jembrana
3. Peningkatan produksi yang diikuti dengan peningkatan mutu, hal ini dimaksudkan dengan peningkatan yang tinggi harus diusahakan nilai produksi yang tinggi pula, contohnya dengan peningkatan mutu ikan yang dihasilkan harus, sehat, segar, dan bebas formalin. Maka di Pelabuhanlah yang akan menyediakan wadah untuk menguji sample ikan yang sudah bebas dari formalin. Setelah bebas dari formalin maka ikan tersebut boleh dipasarkan.
4. Pelabuhan perikanan sebagai Pusat Informasi dan Data Statistik Perikanan, diharapkan kedepannya PPN Pengambengan Jembrana adalah wakil dari seluruh Tempat Pendaratan Ikan/Tempat Pelelangan Ikan yang semua itu adalah wadah penghasil jumlah data dan statistik volume ikan yang di tangkap perhari, per bulan maupun pertahunnya di Kota Jembrana
5. Menciptakan lingkungan pelabuhan perikanan yang bersih hygienis, adalah tolak ukur dari mutu ikan yang akan dipasarkan di daerah tangkapan oleh karena itu baik cara ataupun tindakan pemeliharaan fasilitas-fasilitas pelabuhan yang bersih sangat diperhatikan.
6. Pelabuhan perikanan sebagai fasilitator dalam pengembangan wisata bahari, hal ini dikembangkan sebagai wadah Pendidikan bagi Pelajar untuk mengenalkan Bahwa Laut adalah salah satu kekayaan Indonesia yang indah dan tidak akan pernah habis, oleh karena itu dengan wadah Wisata Bahari di harapkan membangkitkan para generasi muda untuk lebih mencintai laut baik Flora maupun Fauna Laut yang ada di Ekosistem laut
7. Meningkatkan multiplier effect bagi masyarakat Kota Jembrana melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja, diharapkan dengan Pemusatan Kegiatan di Sektor Perikanan maka diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di kota Jembrana sendiri. Hal ini juga diharapkan dengan penambahan tenaga kerja yang bekerja di area PPN Pengambengan Jembrana maka akan mengurangi tingkat kejahatan dengan peningkatan taraf hidup seseorang dari menganggur menjadi pekerja.
8. Pelabuhan perikanan sebagai tempat pemantauan dan pengawasan (monitoring dan control) sumber daya ikan, tahap akhir dari semua itu diharapkan Pelabuhan Perikanan adalah media untuk mengontrol dan memonitoring baik para

Nelayan/Stakeholder yang ada di Kota Jember untuk menjaga dan mengontrol Kebutuhan Usahanya di Bidang Perikanan dalam hal Penangkapan Ikan yang Berlebih karena hal ini sudah termasuk merusak Ekosistem Laut sehingga Sumberdaya Ikan yang ada lambat laun akan habis dan tidak ada lagi, sehingga akan terjadi kepincangan/ ketidakseimbangan Ekosistem Darat dan laut.

Sasaran Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan

Sasaran program pembangunan perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan, antara lain:

1. Nilai PNB Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pengembangan
 - a) Penerimaan PNB Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Rp Juta)
 - Jumlah pemenuhan pelaporan PNB di UPT PPN Pengembangan (dokumen).
2. Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Pengembangan
 - a) Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Pengembangan (Ton)
 - Validasi nilai perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (dokumen)
3. Pengelolaan PPN Pengembangan yang berdaya saing
 - a) Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (Persen)
 - Jumlah permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (dokumen)
 - b) Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai)
 - Nilai Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan berdasarkan data Evkin (Aplikasi)
 - c) Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
 - Jumlah pelayanan kesyahbandaran yang diterbitkan PPN Pengembangan (dokumen)
4. Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Pengembangan yang optimal
 - a) Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)

- Penjumlahan pengembangan fasilitas di PPN Pengembangan
- b) Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
 - Nilai pengendalian lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan berdasarkan data Selaraskan (Aplikasi)
- 5. Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Pengembangan
 - a) Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)
 - Jumlah dokumen kapal perikanan yang diterbitkan oleh PPN Pengembangan
- 6. Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di PPN Pengembangan
 - a) Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)
 - Data nelayan/awak kapal perikanan yang telah menerima pelatihan sertifikasi awak kapal (Dokumen)
- 7. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan
 - a) Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
 - Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Area Manajemen Perubahan
 - Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Area Penataan Tata Laksana
 - Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Area Penataan Sistem Manajemen SDM
 - Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Area Penguatan Akuntabilitas
 - Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Area Penguatan Pengawasan
 - Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Komponen Hasil
 - b) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Pengembangan (Persen)
 - Nilai persentase atas penyelesaian laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK PPN Pengembangan
 - c) Nilai Rekonsiliasi Kinerja (Nilai)
 - Nilai Perencanaan Strategik, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan

Pelaporan Kinerja dari Unit Kerja.

- d) IP ASN PPN Pengembangan (indeks)
 - IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan
- e) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker PPN Pengembangan (Persen)
 - Nilai dari beberapa unsur berikut :
 - Rencana umum pengadaan telah di upload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
 - Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
 - Laporan penyelenggaraan Barang/Jasa Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)
- f) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Pengembangan (Persen)
 - Nilai dari kegiatan yang dilakukan secara baik dan profesional dalam pengelolaan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
- g) Nilai IKPA PPN Pengembangan (Nilai)
 - Realisasi Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan
- h) Nilai Kinerja Anggaran PPN Pengembangan (Nilai)
 - Realisasi anggaran UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (%)
- i) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan
 - Nilai survey dari masyarakat melalui Si Susun KKP (Aplikasi)

Informasi *cascading* Indikator Kinerja Utama (IKU) Level I kepada bawahan (Level II), seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. Tabel Informasi Cascading / Turunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Level I kepada bawahan (Level II)

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Frekuensi	Perhitungan	Satuan	Target
1	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pengembangan	1	Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Rp Juta)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Juta	526,05
2	Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pengembangan meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan (Ton)	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Ton	4800

3	Pengelolaan PPN Pengembangan yang berdaya saing	3	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (Persen)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Persen	100
		4	Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai)	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Nilai	83
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Persen	80
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Pengembangan yang optimal	6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Persen	70
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Nilai	30,01
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Pengembangan	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Kapal	50
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di PPN Pengembangan	9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Persen	20
7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan	10	Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Nilai	45,10
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Persen	75
		12	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Nilai	93

		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Indeks)	Semester	Nilai Posisi Akhir	Indeks	82
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Persen	77,5
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Persen	77,5
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)	Semester	Nilai Posisi Akhir	Nilai	93,75
		17	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Nilai	82
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Indeks)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Indeks	88,21

D. Target Kinerja dan Anggaran Triwulan IV Tahun 2023

Penetapan kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan adalah dokumen perjanjian kinerja yang berisikan penugasan dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan untuk melaksanakan program dan kegiatan pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap yang disertai dengan indikator kinerja Utama (IKU).

IKU merupakan tolak ukur pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, berikut ini adalah IKU UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan yang di *cascading* dari Dirjen Perikanan Tangkap kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan sebagai berikut :

Tabel 5. Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pengambengan	1	Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Rp Juta)	526,05

2	Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pengambengan meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengambengan (Ton)	4.800
3	Pengelolaan PPN Pengambengan yang berdaya saing	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengambengan (Persen)	100
		4	Tingkat Kinerja PPN Pengambengan (Nilai)	83
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)	80
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Pengambengan yang optimal	6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)	70
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)	30,01
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Pengambengan	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	50
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di PPN Pengambengan	9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)	20
7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengambengan	10	Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)	45,10
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)	75
		12	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)	93
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Indeks)	82
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)	77,5
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)	77,5
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)	93,75
		17	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)	82
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Indeks)	88,21

Adapun pagu anggaran yang terdapat pada DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan untuk Tahun 2023 dapat di komposisikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Komposisi Target dan Realisasi Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2023

KODE AKUN	URAIAN	PAGU	TARGET TW 4		REALISASI TW 4		
			TARGET	% TARGET PAGU	REALISASI	% TARGET	% PAGU
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	7.405.475.000	7.405.475.000	100,00%	7.235.993.831	97,71%	97,71%
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	321.680.000	321.680.000	100,00%	316.290.084	98,32%	98,32%
2337.ACA	Perizinan Produk [Base Line]	297.480.000	297.480.000	100,00%	292.090.084	98,19%	98,19%
2337.ACA.001	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	297.480.000	297.480.000	100,00%	292.090.084	98,19%	98,19%
2337.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat [Base Line]	13.000.000	13.000.000	100,00%	13.000.000	100,00%	100,00%
2337.BDC.001	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan	13.000.000	13.000.000	100,00%	13.000.000	100,00%	100,00%
2337.PCA	Perizinan Produk [Base Line]	11.200.000	11.200.000	100,00%	11.200.000	100,00%	100,00%
2337.PCA.001	Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan	11.200.000	11.200.000	100,00%	11.200.000	100,00%	100,00%
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	7.023.975.000	7.023.975.000	100,00%	6.875.807.699	97,89%	97,89%
2338.BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi [Base Line]	3.516.525.000	3.516.525.000	100,00%	3.431.466.028	97,58%	97,58%
2338.BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	2.663.925.000	2.663.925.000	100,00%	2.590.591.028	97,25%	97,25%
2338.BGA.004	Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya	852.600.000	852.600.000	100,00%	840.875.000	98,62%	98,62%
2338.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan [Base Line]	717.800.000	717.800.000	100,00%	708.692.815	98,73%	98,73%
2338.RAL.001	Sarana pelabuhan perikanan mendukung pelaksanaan PIT dan PNBK Perikanan Tangkap yang disediakan	717.800.000	717.800.000	100,00%	708.692.815	98,73%	98,73%
2338.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan [Base Line]	2.789.650.000	2.789.650.000	100,00%	2.735.648.856	98,06%	98,06%
2338.RBQ.001	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	2.594.650.000	2.594.650.000	100,00%	2.554.706.441	98,46%	98,46%
2338.RBQ.003	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf	195.000.000	195.000.000	100,00%	180.942.415	92,79%	92,79%

	internasional yang dikembangkan						
2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	8.000.000	8.000.000	100,00%	7.000.000	87,50%	87,50%
2339.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat [Base Line]	8.000.000	8.000.000	100,00%	7.000.000	87,50%	87,50%
2339.QDC.003	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	8.000.000	8.000.000	100,00%	7.000.000	87,50%	87,50%
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	51.820.000	51.820.000	100,00%	36.896.048	71,20%	71,20%
2341.QKB	Pemantauan produk [Base Line]	51.820.000	51.820.000	100,00%	36.896.048	71,20%	71,20%
2341.QKB.001	Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	51.820.000	51.820.000	100,00%	36.896.048	71,20%	71,20%
032.03.WA	Program Dukungan Manajemen	10.719.838.000	10.719.838.000	100,00%	10.640.696.288	99,26%	99,26%
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	10.719.838.000	10.719.838.000	100,00%	10.640.696.288	99,26%	99,26%
2342.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi[Base Line]	86.600.000	86.600.000	100,00%	86.434.100	99,81%	99,81%
2342.CAN.955	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	86.600.000	86.600.000	100,00%	86.434.100	99,81%	99,81%
2342.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]	10.241.728.000	10.241.728.000	100,00%	10.170.307.482	99,30%	99,30%
2342.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	34.000.000	34.000.000	100,00%	26.425.505	77,72%	77,72%
2342.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	16.000.000	16.000.000	100,00%	6.731.200	42,07%	42,07%
2342.EBA.994	Layanan Perkantoran	10.191.728.000	10.191.728.000	100,00%	10.137.150.777	99,46%	99,46%
2342.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line]	125.000.000	125.000.000	100,00%	124.997.480	100,00%	100,00%
2342.EBB.951	Layanan Sarana Internal	125.000.000	125.000.000	100,00%	124.997.480	100,00%	100,00%
2342.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal [Base Line]	49.410.000	49.410.000	100,00%	48.699.465	98,56%	98,56%
2342.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	49.410.000	49.410.000	100,00%	48.699.465	98,56%	98,56%
2342.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line]	217.100.000	217.100.000	100,00%	210.257.761	96,85%	96,85%
2342.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	60.000.000	60.000.000	100,00%	56.889.358	94,82%	94,82%
2342.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	37.200.000	37.200.000	100,00%	36.499.802	98,12%	98,12%
2342.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	119.900.000	119.900.000	100,00%	116.868.601	97,47%	97,47%

E. Rencana Aksi Penetapan Kinerja

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen RKAKL. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output kinerja dan anggaran. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU **Perspektif Internal Process dan Learning and Growth** yang disandingkan dengan indikator kegiatan pada pencapaian Form DA setiap bulannya sehingga di

dapat persentase pencapaian secara berkala. Sebagaimana pada tabel perbandingan capaian IKU dan Anggaran di bawah ini, sebagai berikut ini:

Tabel 7. Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target	Target	Capaian
					2023	s/d DESEMBER	s/d DESEMBER
S.01	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pengambengan						120
IKS.1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Rp juta)	Juta	Maximize	Nilai Posisi Akhir	526,05	526,05	1.114,44
IKS.2	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengambengan (Ton)	Ton	Maximize	Nilai Posisi Akhir	4.800,00	4.800,00	14.057,00
S.02	Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Pengambengan						
S.03	Pengelolaan PPN Pengambengan yang Berdaya Saing						109,53
IKS.03.1	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengambengan (persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100
IKS.03.2	Tingkat Kinerja di PPN Pengambengan (Nilai)	nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	83	83	90,39
IKS.03.3	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	80	100
S.04	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas PPN Pengambengan yang Optimal						108,38
IKS.04.1	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	70	70,45
IKS.04.2	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	30,01	30,01	74,6

		Nusantara Pengembangan (Nilai)						
	S.05	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di PPN Pengembangan						120
	IKS.05.1	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	Kapal	Maximize	Nilai Posisi Akhir	50	50	1.003,00
	S.06	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan Tersertifikasi/Terlindungi di PPN Pengembangan						120
	IKS.06.1	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	20	20	71
	S.07	Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI Perairan Laut yang Bertanggung Jawab di PPN Pengembangan						
	S.07	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan						110,84
	IKS.07.1	Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	45,1	45,1	80,75
	IKS.07.2	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75	75	97
	IKS.07.3	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93	93	98,24
	IKS.07.4	Indeks Profesionalitas ASN PPN Pengembangan (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	82	89,73

	IKS.07.5	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Pengambengan (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77,5	77,5	96,29
	IKS.07.6	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Pengambengan (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77,5	77,5	87,5
	IKS.07.7	Nilai IKPA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,75	93,75	96,4
	IKS.07.8	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	82	86,76
	IKS.07.9	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,21	88,21	89,08

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap melalui evaluasi kinerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan Tahun 2023 diukur melalui 18 indikator kinerja. Adapun pembahasan masing-masing indikator kinerja utama (IKU) akan dicantumkan pada sub bab berikut sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pengambangan

IKU 1 – Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Rp Juta)

Indikator Nilai PNBPN PPN Pengambangan adalah seluruh penerimaan PPN Pengambangan yang merupakan pelaksanaan dari fungsi perusahaan PPN Pengambangan sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PPN Pengambangan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PPN Pengambangan terdiri atas penerimaan umum dan penerimaan fungsional. Penerimaan umum berasal dari Pendapatan dari lelang Bangunan, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran dan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu. Sedangkan penerimaan fungsional merupakan pendapatan yang diperoleh Pelabuhan yang berasal dari pelayanan jasa yang ada di PPN Pengambangan. Kegiatan pelayanan jasa di PPN Pengambangan adalah sebagai berikut:

- Pelayanan Jasa Tambat Labuh;
- Pelayanan Jasa Air;
- Pelayanan Jasa *Cold Room dan Freezer*;

- Pelayanan Jasa Kendaraan (Truk Refrigerator, Dump Truk dll);
- Pelayanan Jasa Penggunaan Tanah dan/atau bangunan;
- Pelayanan Jasa Penumpukan Barang/Penjemuran jaring/ikan;
- Pelayanan Jasa Pas Masuk;
- Pelayanan Jasa Kebersihan Pelabuhan;
- Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana;
- Pelayanan Jasa Listrik;

Target indikator ini pada tahun 2023 sebesar 526,05 juta rupiah dengan periode pengukuran tahunan.

Tabel 8. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 1		Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pengembangan					
Indikator Kinerja – 1		Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Rp Juta)					
Tahun 2022		Tahun 2023		% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	Target Tahun 2023	Realisasi	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	% Realisasi thd Target Renstra
350	943	526,05	1114,44	118,13	211,85	450	247,55

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memiliki realisasi lebih besar dari target yang telah ditentukan. Target tahun 2023 yaitu 526,05 juta rupiah sedangkan realisasi sebesar 1114,44 juta rupiah. Capaian Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan berasal dari Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan dan SKPT PP Teluk Awang (Pelabuhan Binaan PPN Pengembangan).

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut di atas, persentase realisasi tahun 2023 lebih besar jika dibandingkan dengan capaian terhadap realisasi tahun 2022 sebesar 118,13.

Realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 1.114.448.970,- sedangkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 943.341.170,-. Jika dibanding dengan tahun yang lalu, capaian tahun ini lebih tinggi yakni sebesar 211,85%. Jika dilihat dari nilai penerimaannya tidak terlalu tinggi selisihnya, namun prosentase capaian untuk tahun ini menjadi tinggi dikarenakan perbandingan targetnya rendah sehingga realisasi capaian menjadi signifikan. Peningkatan penerimaan PNBP ini disebabkan karena adanya penerimaan PNBP Umum yang cukup banyak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga berpengaruh pada meningkatnya capaian PNBP.

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2023 terhadap Renstra

Berdasarkan data tersebut, indikator Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan tahun 2023 jika dibandingkan dengan target dalam renstra (2024) mencapai 247,55%.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 9. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengambangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
1114,44	1945,04	57,29

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan hanya mencapai 57,29%. Hal ini disebabkan karena capaian PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dari pendapatan jasa pelabuhan perikanan yang besar sedangkan di pelabuhan perikanan nusantara pengambangan pendapatan jasa pelabuhan perikanan lebih kecil karena terkendala perijinan kapal-kapal yang ada di pelabuhan perikanan nusantara pengambangan, belum adanya pagar keliling dan kurangnya aktifitas nelayan untuk melaut.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Adanya penurunan pada penerimaan PNBP seperti pada penerimaan jasa kebersihan, Pas masuk, jasa penggunaan tanah dan/atau bangunan, listrik, tambat labuh dan air. Jika dilihat dari penerimaan yang ada, penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan sehingga berpengaruh pada pelayanan jasa yang diberikan. Sedangkan untuk jenis pelayanan jasa *cold storage*

meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan meskipun tidak banyak ikan, namun pada saat ramai ikan pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2023 ketika ikan banyak, maka banyak juga yang menggunakan jasa *cold storage* PPN Pengambengan. Sedangkan pada penerimaan Pas masuk menurun dikarenakan belum adanya pagar kawasan pelabuhan sehingga akses masuk menuju pelabuhan tidak satu pintu/terdapat jalan tikus sehingga banyak yang lolos dari jasa Pas masuk. Kurangnya jumlah petugas pas masuk juga berpengaruh pada penerimaan Pas masuk. Dengan adanya pagar kawasan pelabuhan diharapkan dapat menjadi solusi dari keamanan dan peningkatan penerimaan PNBP di PPN Pengambengan.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 10. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)
Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	212%	362.142.000	355.331.837	767.199.944	411.868.107

Pada Tahun 2023, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan sebesar Rp 355.331.837, . Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 114%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan adalah tim kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

g. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Perhitungan dari indikator ini diperoleh dari pencapaian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh dari Pelayanan jasa Tambat labuh, Pelayanan Kebersihan, Pelayanan jasa Pengadaan Air, Pelayanan Listrik, Pelayanan jasa

Pengadaan Es, Pelayanan Pas Masuk, Pelayanan Penggunaan Tanah dan bangunan, Pelayanan jasa penggunaan kendaraan/dumptruck, Pelayanan Jasa Penggunaan *Cold Storage* di PPN Pengambengan.

Pendapatan PNPB ini dapat dilakukan dengan maksimal jika penjagaan di pintu masuk dapat dilakukan dengan baik, dengan didirikan pagar Kawasan. Namun jika tidak terdapat pagar Kawasan pengunjung dapat lewat melalui pagar lainnya.

Sasaran Strategis 2

Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pengambengan

IKU 2 – Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengambengan (Ton)

Indikator Kinerja Utama Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan merupakan hasil dari volume produksi yang didaratkan perusahaan perikanan serta pelabuhan perikanan. Realisasi produksi perikanan tangkap PPN Pengambengan dilaporkan secara berkala setiap triwulan. Volume produksi Tahun 2023 adalah sebanyak 14.057 Ton atau 120% dari target Tahun 2023 sebesar 4.800 Ton. Realisasi produksi perikanan tangkap dilaporkan secara berkala setiap triwulan.

Tabel 11. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 2		Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pengambengan					
Indikator Kinerja – 2		Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengambengan					
Tahun 2022		Tahun 2023		% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	Target Tahun 2023	Realisasi	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	% Realisasi thd Target Renstra
13.200	12.300	4.800	14.057	114,28	292,85	14.400	97,61

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengambengan (Ton) memiliki realisasi lebih besar dari target yang telah ditentukan. Target tahun 2023 yaitu 4.800 ton sedangkan realisasi sebesar 14.057 ton. Target jumlah produksi perikanan tangkap di PPN Pengambengan dapat tercapai karena faktor antara lain:

Rata-rata kontribusi penangkapan di perairan umum memiliki pertumbuhan kontribusi yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penangkapan di perairan umum cukup baik dan akan semakin berkontribusi terhadap total volume jika pengelolaan perikanan di perairan umum lebih diperhatikan (termasuk kelembagaan dan sistem pencatatan data hasil tangkapan). Produksi perikanan tangkap dominan di Pelabuhan adalah lemuru, tongkol, layang, dan tembang.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut, realisasi tahun 2023 lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 114,28. Realisasi tahun 2023 sebesar 14.057 ton sedangkan realisasi tahun 2022 sebesar 12.300 ton. Hal ini disebabkan frekuensi keberangkatan kapal yang melaut pada bulan Juli-Desember meningkat karena musim dan cuaca yang mendukung dan pasokan bahan bakar yang memadai.

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2023 terhadap indikator tahun menengah

Berdasarkan data tersebut, indikator Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan tahun 2023 jika dibandingkan dengan target dalam renstra (2024) mencapai 97,61%.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 12. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengambangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
14.057	26.525	52,99

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan hanya mencapai 52,99%. Hal ini disebabkan karena perbedaan target produksi yang cukup jauh di mana PPN Prigi mempunyai target tahunan yaitu sebesar 13.000 ton di tahun 2023 ini, dibandingkan PPN Pengambangan yang menargetkan 4.800 ton.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Jumlah produksi perikanan tangkap yang berasal dari laut dan produksi perikanan tangkap yang berasal dari perairan pedalaman yang didaratkan di PPN Pengambangan. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap yang merupakan hasil

perhitungan gabungan dari volume produksi yang didaratkan perusahaan perikanan, pelabuhan perikanan dan hasil estimasi di desa sampel yakni desa perikanan yang terpilih sebagai desa untuk dilakukan kegiatan pengumpulan/pendataan statistik perikanan tangkap, dipilih secara metodologi melalui kerangka survei. Realisasi jumlah produksi perikanan tangkap UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan diukur dan dilaporkan secara berkala setiap bulan. Indikator ini dapat memenuhi target jumlah produksi apabila jumlah tangkapan melebihi target di tahun 2023. Jika dibandingkan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap pada Tahun 2022, maka volume produksi pada tahun 2023 mengalami kenaikan.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 13. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)
Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengambengan	293%	629.665.000	619.582.118	1.844.000.189	1.224.418.071

Pada Tahun 2023, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengambengan sebesar Rp 619.582.118,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 194%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengambengan adalah tim kerja Operasional Pelabuhan dan operator PIPP sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan merupakan hasil perhitungan dari jumlah produksi perikanan tangkap yang berasal dari laut yang didaratkan di PPN Pengambengan. Jumlah produksi perikanan tangkap UPT PPN Pengambengan pada Tahun 2023 yaitu 14.057 ton mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yang sebesar 12.300 ton. Hal ini disebabkan tingginya jumlah kapal yang melakukan bongkar muat dan

meningkatnya volume produksi pada bulan Juli sampai dengan Desember, walaupun pada awal tahun 2023 mengalami cuaca buruk dan kondisi perairan yang tidak mendukung untuk dilakukan penangkapan ikan. Upaya – upaya yang dilakukan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan dalam meningkatkan capaian indikator ini adalah dengan meningkatkan keahlian nelayan, Sosialisasi tentang Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan yang dapat diakses oleh nelayan setiap hari sebelum berangkat melaut. Pelaksanaan IKU Jumlah Produksi Perikanan Tangkap PPN Pengambangan tahun 2023 ini di dukung oleh anggaran kegiatan penyiapan bahan koordinasi pengolahan, verifikasi, validasi dan analisis.

Sasaran Strategis 3

Pengelolaan PPN Pengambangan yang Berdaya Saing

IKU 03 - Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengambangan (Persen)

Indikator Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengambangan merupakan indikator baru yang ada di tahun 2023. Permohonan perusahaan dilakukan oleh pelaku usaha pada saat melakukan penggunaan tanah dan atau bangunan baik untuk permohonan baru maupun perpanjangan. Target indikator ini pada tahun 2023 sebesar 100 persen dengan periode pengukuran tahunan.

Tabel 14. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 3		Pengelolaan PPN Pengambangan yang Berdaya Saing					
Indikator Kinerja – 3		Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengambangan (Persen)					
Tahun 2022		Tahun 2023		% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	Target Tahun 2023	Realisasi	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	% Realisasi thd Target Renstra
-	-	100	100	-	100	-	-

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengambangan memiliki realisasi sama dari target yang telah ditentukan. Target dan realisasi tahun 2023 yaitu 100 persen. Pada tahun 2023 terdapat 38 permohonan dimana semua permohonan dianalisis, ditelaah untuk dapat dilakukan proses lebih lanjut. Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengambangan dapat tercapai 100% dikarenakan semua permohonan yang masuk telah diverifikasi dan dianalisis maupun ditelaah sehingga dapat dinilai bahwa permohonan tersebut layak atau tidak.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun lalu karena merupakan indikator baru pada tahun 2023

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2023 terhadap Renstra

Berdasarkan data tersebut, IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan Renstra karena merupakan indikator baru pada tahun 2023

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 15. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengambangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
100	100	100

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan mencapai 100%.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Adanya Aplikasi SIPAUS (Sistem Informasi Pelayanan dan Perusahaan) dapat meningkatkan dan memberikan kemudahan pelayanan perusahaan sehingga tercapainya indikator permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 16. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)
Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengambengan	100%	75.890.000	75.643.838	75.890.000	246.162

Pada Tahun 2023, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengambengan sebesar Rp 75.643.838,. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 0%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengambengan adalah tim kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan perusahaan di Pelabuhan perikanan merupakan salah satu tugas dan fungsi Pelabuhan sesuai dengan Permen kelautan dan perikanan nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Kegiatan ini masuk dalam Program dan Anggaran PPN Pengambengan dengan anggaran sebesar Rp. 86.341.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 84.379.557,- atau capaian sebesar 97,73%. Pada indikator kinerja ini kegiatan yang dilakukan terkait sosialisasi aplikasi SIJAKA dan SIPAUS, kegiatan Evaluasi Perusahaan, Rapat stake holder dan kegiatan lain yang menunjang perusahaan. Pada kegiatan ini tentunya tidak hanya keberhasilan dalam pencapaian realisasi anggaran saja yang dicapai namun output dari kegiatannya juga perlu diperhatikan. Melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan diharapkan pelaku usaha lebih memahami aturan yang telah ditetapkan terkait perusahaan sehingga pelaku usaha lebih tertib dalam berinvestasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan dan

dapat berpengaruh pada peningkatan PNPB.

IKU 04 - Tingkat Kinerja PPN Pengambengan (Nilai)

Indikator ini merupakan nilai tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan. Perhitungan indikator ini ditinjau dari evaluasi kinerja pelabuhan perikanan yang di nilai oleh eselon I (DJPT) meliputi operasional tambat labuh, pas masuk, workshop, *Coldstorage*, *Ice Crusher Machine*, *Docking/Slipway*, pemakaian peralatan TPI, penyaluran air ke kapal, penyaluran air bersih, penyaluran es, penyaluran BBM, jumlah tenaga kerja, data frekuensi kunjungan kapal, jumlah kapal yang di inspeksi, jumlah kapal hasil pengujian formalin, jumlah kapal yang mendaratkan ikan yang diterbitkan setiap bulan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan. Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan meliputi : operasional tambat labuh, pas masuk, workshop, *cold storage*, *ice crusher machine*, pemakaian peralatan TPI, penyaluran air bersih, es, jumlah tenaga kerja, data frekuensi kunjungan kapal, jumlah kapal yang di inspeksi, jumlah kapal hasil yang di inspeksi, jumlah kapal hasil pengujian formalin.

Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan merupakan indikator yang menunjukkan prosentase pencapaian kegiatan operasional pelabuhan perikanan.

Tabel 17. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 3		Pengelolaan PPN Pengambengan yang Berdaya Saing					
Indikator Kinerja – 4		Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengambengan (Persen)					
Tahun 2022		Tahun 2023		% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	Target Tahun 2023	Realisasi	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	% Realisasi thd Target Renstra
82	92,72	83	90,39	97,48	108,90	84	107,60

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator tingkat *Kinerja* Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan memiliki realisasi lebih besar dari target yang telah ditentukan. Target Tahun 2023 yaitu 83 ton sedangkan realisasi sebesar 90,39 ton atau sebesar 108,90 persen.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut, realisasi tahun 2023 lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 97,48 %. Realisasi tahun 2023 sebesar 90,39 sedangkan realisasi tahun 2022 sebesar 92,72. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu turunnya frekuensi pengiriman data produksi yang rendah. Selain itu juga kurangnya daya tampung pada kolam pelabuhan, kurangnya pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis, serta capaian penerbitan STBLKK yang kurang dari 50 persen.

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2023 terhadap indikator RENSTRA

Berdasarkan data tersebut, indikator tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan tahun 2023 jika dibandingkan dengan target dalam renstra (2024) mencapai 107,60%.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 18. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengambangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
90,39	92,81	97,39

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan hanya mencapai 97,39%. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu turunnya frekuensi pengiriman data produksi yang rendah karena pada semester 1 tahun 2023 jumlah pendaratan kapal perikanan berkurang akibat cuaca buruk. Selain itu juga kurangnya daya tampung pada kolam pelabuhan yang disebabkan adanya pendangkalan di kolam pelabuhan, kurangnya pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis, serta capaian penerbitan STBLKK pada aplikasi Teman SPB yang kurang dari 50 persen.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Dapat dilihat dari nilai EVKIN Tahun 2023 yaitu 90,39. Nilai ini didukung oleh Pelayanan Kesyahbandaran seperti pelayanan e logbook, penerbitan SPB online, penerbitan SHTI, dan penerbitan STBLKK yang terintegrasi pada aplikasi Teman SPB. Kemudian didukung juga dengan kegiatan Penyediaan Data Perikanan

Tangkap, Tingkat Pelayanan Usaha Pengguna Jasa yang terstandarisasi, Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana. Ditambah lagi dengan adanya ketersediaan SDM pengelola pelabuhan dan penyerapan tenaga kerja di kawasan pelabuhan perikanan, serta jumlah investor yang terdapat di pelabuhan perikanan.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 19. Realisasi anggaran untuk mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)
Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	109%	606.271.000	567.620.409	660.251.032	92.630.623

Pada Tahun 2023, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan sebesar Rp 567.620.409,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 15%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Tingkat Kinerja PPN Pengambengan adalah penanggung jawab masing-masing kriteria pada masing-masing tim kerja dan operator PIPP sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

g. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang kinerja

Perhitungan dari indikator ini adalah Rata – rata dari Capaian kegiatan yang mendukung operasional pelabuhan perikanan. Pengukuran indikator ini dilakukan sepanjang tahun kegiatan dan dilaporkan hasilnya setiap bulannya. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung operasional pelabuhan yaitu dilaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penanganan ikan yang baik kepada nelayan. Tidak hanya itu, kegiatan lain yang telah dilaksanakan yaitu sinkronisasi data produksi perikanan tangkap yang didaratkan di PPN Pengambengan dengan instansi terkait.

IKU 05 - Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)

Indikator - *Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan* merupakan indikator baru yang ada di tahun 2023. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam hal ini *Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran* adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kesyahbandaran seperti Permohonan Persetujuan Berlayar, Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan dan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal dll terkait operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan yang diajukan oleh pengguna jasa di pelabuhan. Target indikator ini pada tahun 2023 sebesar 80 persen dengan periode pengukuran tahunan.

Perhitungan tingkat pelayanan kesyahbandaran dilakukan berdasarkan jumlah pelayanan yang diajukan di PPN Pengembangan dengan bobot masing masing yang berbeda antar pelayanan. Pelayanan publik dikatakan baik jika memenuhi beberapa asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan serta ketepatan waktu dan maka dari itu dalam rangka peningkatan pelayanan kesyahbandaran perlu dilakukan perbaikan beberapa aspek aspek agar terciptanya tingkat pelayanan kesyahbandaran yang baik.

Tabel 20. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 3		Pengelolaan PPN Pengembangan yang Berdaya Saing					
Indikator Kinerja – 5		Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)					
Tahun 2022		Tahun 2023		% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	Target Tahun 2023	Realisasi	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	% Realisasi thd Target Renstra
-	-	80	100	-	80	-	-

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Tingkat *Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan* memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Target tahun 2023 sebesar 80 persen dan realisasi tahun 2023 yaitu 100 persen. Tingkat *Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan* dapat tercapai karena faktor antara lain :

1. PPN Pengambangan telah mencanangkan program yaitu Wilayah Bebas korupsi (WBK) dimana didalamnya ada poin poin dalam peningkatan kualitas pelayanan public sehingga ada peningkatan dari segi petugas pelayanan, fasilitas dll sehingga dapat menunjang pelayanan public yang baik
2. Keterbukaan informasi pelayanan yang mudah diakses sehingga persyaratan aturan dll dapat dipahami oleh pengguna jasa sehingga berkas permohonan yang masuk adalah permohonan yang sudah sesuai dengan persyaratan sehingga langsung dapat dilayani dengan baik
3. Sosialisasi yang cukup efektif dengan pengguna jasa terkait aturan aturan baru dan komunikasi yang baik sehingga dapat menunjang kinerja pelayanan public di PPN Pengambangan

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun lalu karena merupakan indikator baru pada tahun 2023

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2023 terhadap Renstra

Berdasarkan data tersebut, IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan Renstra karena merupakan indikator baru pada tahun 2023

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 21. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengambangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
100	41,47	241,13

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan mencapai 241,13%. Hal

ini disebabkan karena kerjasama dan komunikasi yang baik antara petugas pelayanan publik dan pengguna jasa sehingga dalam rangka meningkatkan pelayanan kita bersifat terbuka dalam menerima masukan dll agar pelayanan tidak terhambat dan dapat terlayani 100 %

h. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Setiap unit kerja pemerintah dituntut untuk menjalankan program berdasarkan IKU yang telah ditetapkan serta menata manajemennya dengan baik. Tujuan dasar adalah bagaimana dalam hal ini IKU terkait tingkat pelayanan kesyahbandaran dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan suatu unit kerja dalam mencapai tujuan itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam berkomunikasi dengan pengguna jasa dalam rangka menginformasikan aturan aturan yang telah dibuat . dalam hal ini komunikasi menjadi sangat penting dalam menjalankan program program antara pemerintah dengan pelaku usaha yang dibatasi dengan koridor koridor aturan sehingga hal itu yang kadang menjadi kendala sehingga pelayanan terkesan menyulitkan aturan yang tumpang tindih dll. Sehingga komunikasi merupakan hal terpenting dalam menjalankan program pemerintah. Sehingga dalam meningkatkan pelayanan kesyahbandaran perlu adanya komunikasi antar pengguna jasa dan unit pelayanan public yaitu PPN Pengembangan

i. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 22. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)
Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	125%	734.333.000	719.541.256	917.916.250	198.374.994

Pada Tahun 2023, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara

Pengembangan sebesar Rp 719.541.256,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 27%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran adalah Tim Kerja Kesyahbandaran sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

j. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dukungan kegiatan sosialisasi sosialisasi yang cukup sehingga akan mengurangi miss informasi. Komunikasi yang efektif memungkinkan kita untuk membangun hubungan yang kuat dan memahami satu sama lain dengan lebih baik dalam menjalankan program program yang ada. bahwa komunikasi pemerintah sangat penting dilakukan terutama dalam hal pelayanan publik. Komunikasi pemerintah menjadi titik utama dalam suksesnya keberlangsungan pelayanan publik guna mewujudkan good governance sebab pemerintah berperan sebagai komunikator yang menyalurkan berbagai info pada masyarakat dan mempersuasi masyarakat agar turut aktif dalam pengembangan sumber daya publik.

Sasaran Strategis 4

Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Pengembangan yang optimal

IKU-06 - Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan

Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)

Indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan merupakan indikator baru yang ada di tahun 2023. Pengendalian pengembangan fasilitas merupakan indicator terkait fasilitas pada Pelabuhan yang tersedia dibandingkan fasilitas yang ada pada master plan. Dalam Masterplan PPN pengembangan Tahun 2009 terdapat 44 fasilitas yang tersedia namun di PPN Pengembangan saat ini eksisting fasilitas sebanyak 31 fasilitas. Target indikator ini pada tahun 2023 sebesar 70 persen dengan periode pengukuran tahunan.

Tabel 23. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 4		Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Pengembangan yang optimal					
Indikator Kinerja – 6		Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)					
Tahun 2022		Tahun 2023		% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	Target Tahun 2023	Realisasi	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	% Realisasi thd Target Renstra
-	-	70	70,45	-	100,64	-	-

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator *Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan* memiliki realisasi lebih besar dari target yang telah ditentukan. Target tahun 2023 sebesar 70 dan realisasi tahun 2023 sebesar 70,45 persen. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan dapat tercapai dikarenakan telah tersedianya fasilitas yang sesuai master plan sebanyak 31 fasilitas dari 44 fasilitas yang ada pada master plan. Dari 31 fasilitas tersebut telah memenuhi standar dari fasilitas yang harus tersedia pada Pelabuhan perikanan sesuai dengan Permen Kelautan dan perikanan Nomor 8 tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Namun demikian PPN Pengembangan masih harus berupaya untuk dapat memenuhi fasilitas yang lebih baik sehingga tanah yang tersedia dapat digunakan secara maksimal dan bermanfaat bagi Masyarakat. Tentunya hal ini juga disesuaikan dengan anggaran yang ada.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun lalu karena merupakan indikator baru pada tahun 2023

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2023 terhadap Renstra

Berdasarkan data tersebut, IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan Renstra karena merupakan indikator baru pada tahun 2023

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 24. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
70,45	74,58	94,46

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan hanya mencapai 94,46%. Hal ini disebabkan karena Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi lebih dulu menjadi UPT DJPT dibandingkan dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sejak tahun 2007 menjadi UPT DJPT sehingga fasilitas PPN Prigi lebih lengkap.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Pada IKU Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sudah tercapai dengan persentase 100,64% namun untuk dapat mencapai realisasi standar nasional dengan diberikan anggaran untuk Pengembangan Fasilitas karena sejak tahun 2017 Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan tidak diberikan anggaran untuk Pengembangan Fasilitas.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 25. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)
Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	101%	2.594.650.000	2.554.706.441	2.611.329.893	56.623.452

Pada Tahun 2023, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebesar Rp 2.554.706.441,-. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 2%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada IKU Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan, anggaran yang tersedia untuk pemeliharaan yang dilakukan oleh Timja TKPU sebesar Rp. 942.316.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 941.209.307,- atau mencapai 99,88%. Kegiatan yang dilakukan antara lain pemeliharaan terkait fasilitas Pelabuhan sehingga fasilitas yang ada dapat digunakan secara maksimal. Adapun pemeliharaan yang dilakukan terkait pemeliharaan bangunan Gedung dan bangunan, Peralatan dan mesin, jaringan air, jaringan, jalan dan jembatan. Kegiatan ini dapat tercapai dengan adanya Kerjasama dari Tim Kerja di PPN Pengembangan. Membangun Tim Kerja yang solid sangat diperlukan dalam pencapaian target dari kinerja Pelabuhan.

IKU 07 - Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)

Indikator *Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan* merupakan indikator baru yang ada di tahun 2023. Pengendalian Lingkungan merupakan indikator yang memuat kegiatan yang dilakukan dalam menjaga kondisi lingkungan yang sesuai dengan standar. Kegiatan ini juga di pantau melalui aplikasi SELARASKAN (Sistem Pelaporan Ragam Informasi Lingkungan Pelabuhan Perikanan). Target indikator ini pada tahun 2023 sebesar 30,01 persen dengan periode pengukuran tahunan.

Tabel 26. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 4		Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Pengembangan yang optimal					
Indikator Kinerja – 7		Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)					
Tahun 2022		Tahun 2023		% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	Target Tahun 2023	Realisasi	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	% Realisasi thd Target Renstra
-	-	30,01	74,6	-	248,58	-	-

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator *Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan* memiliki realisasi lebih besar dari target yang telah ditentukan. Target tahun 2023 sebesar 30,01 dan realisasi tahun 2023 sebesar 79,07. *Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan* dapat tercapai karena Kerjasama dari Tim Kerja sehingga kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan aplikasi pada SELARASKAN dapat dilakukan sehingga mendapatkan nilai yang semaksimal mungkin. Aplikasi ini merupakan aplikasi baru, sehingga pengguna perlu mempelajari lebih dalam lagi terkait aplikasi tersebut sehingga pada tahun 2024 nanti dapat diperoleh nilai yang lebih baik lagi dari tahun 2023.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun lalu karena merupakan indikator baru pada tahun 2023

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2023 terhadap Renstra

Berdasarkan data tersebut, IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan Renstra karena merupakan indikator baru pada tahun 2023

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 27. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengambengan	Capaian PPN Prigi	Persentase
74,6	91,27	81,73

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan hanya mencapai 81,73%. Hal ini disebabkan karena data dukung penilaian pada aplikasi selaraskan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dan belum maksimal.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Pada IKU Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan sudah tercapai sangat baik dengan persentase 263,47%, keberhasilan ini dukungan dan komitmen Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan memenuhi penilaian yang dipersyaratkan pada aplikasi SELARASKAN. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian ini perlu adanya sosialisasi pihak-pihak terkait data dukung untuk penilaian.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 28. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)
Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	249%	255.624.000	252.871.570	635.439.867	382.568.297

Pada Tahun 2023, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan sebesar Rp 252.871.570 ,- Sedangkan efisiensi penggunaan

anggaran sebesar 150%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan adalah Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha dan Operator Selaraskan sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini yakni kegiatan terkait uji kualitas air dan udara yang dilakukan setiap semester. Dengan adanya ketersediaan anggaran untuk uji kualitas ini diharapkan nilai dari Selaraskan dapat lebih maksimal. Adapun Uji yang dilakukan melalui Laboratorium Hyperkes, dan ada juga dari Unilab Perdana dan Laboratorium BPISDKP. Selain uji kualitas air yang dilakukan, kegiatan lain yang menunjang seperti kegiatan kebersihan, pemeliharaan, hemat energi juga dapat menunjang penilaian dalam selaraskan. Sehingga perlu adanya Kerjasama dalam Tim Kerja Pelabuhan dalam pencapaian indikator tersebut.

Sasaran Strategis 5

Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Pengambangan

IKU-08 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)

Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan merupakan indikator baru yang ada di tahun 2023. ***Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan*** merupakan Indikator laporan atas hasil pelaksanaan perijinan terhadap kapal perikanan yang terdaftar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan, antara lain Sertifikat Kelaiakan Kapal Perikanan (SKKP). Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan atau disingkat adalah surat kapal yang menyatakan bahwa Kapal Perikanan memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan untuk Keselamatan pelayaran. PPN Pengambangan sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan melayani pengurusan SKPP. Target indikator ini pada tahun 2023 sebesar 50 kapal dengan periode pengukuran tahunan.

Tabel 29. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 5		Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Pengambengan					
Indikator Kinerja – 8		Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)					
Tahun 2022		Tahun 2023		% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	Target Tahun 2023	Realisasi	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	% Realisasi thd Target Renstra
85	85	50	1003	1180	2006	60	1671

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator **Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan** memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Target tahun 2023 sebesar 50 persen dan realisasi tahun 2023 yaitu 1003 persen. Tingkat **Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan** dapat tercapai karena faktor antara lain :

1. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan melakukan pelayanan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan di 3 provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Melaksanakan Sosialisasi di UPT Daerah terkait SKKP;
3. Bekerjasama dengan petugas daerah dalam rangka membantu proses perlengkapan dan pengajuan SKKP;
4. Bertambahnya petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut, realisasi tahun 2023 lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 1180%. Realisasi tahun 2023 sebesar 1003 sedangkan realisasi tahun 2022 sebesar 85. Hal ini disebabkan karena sertifikat kelaikan kapal perikanan yang sebelumnya di terbitkan oleh Kementerian Perhubungan pada tahun 2023 sudah di serahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk penerbitannya.

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2023 terhadap Renstra

Berdasarkan data tersebut, indikator **Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan** tahun 2023 jika dibandingkan dengan target dalam renstra

(2024) mencapai 1671%.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 30. perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengambangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
1003	337	297,62

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan mencapai 297,62%. Hal ini disebabkan karena jangkauan daerah pelayanan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan yang dilakukan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan lebih luas dibandingkan dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang meliputi 3 provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Pada Triwulan IV ini terdapat permasalahan diantaranya beberapa kapal yang masa berlaku izinnya telah habis, sehingga pengurus kapal sedang melakukan perpanjangan izin. Saran yang dapat diberikan oleh Petugas Kesyahbandaran untuk mengantisipasi keterlambatan pengurusan izin kapal adalah mengingatkan pada pengurus kapal apabila masa berlaku akan segera habis sehingga pengurus dapat menyiapkan berkas lebih cepat dan proses perpanjangan ijin dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 31. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)
Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan	2006%	297.480.000	292.090.084	5.967.448.800	5.675.358.716

Pada Tahun 2023, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan sebesar Rp 292.090.084,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1908%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan adalah penanggung jawab masing-masing kriteria pada masing-masing tim dan operator SKKP sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan ini dapat berjalan baik dengan memperhatikan aspek yang dapat di perhatikan, antara lain :

1. Kesiapan dari pihak pemilik/pengurus kapal untuk melaporkan kelengkapan perizinan dengan melengkapi berkas yang diperlukan dan mengikuti tahapan proses perizinan;
2. Kerjasama yang baik antara petugas UPT Daerah dengan petugas pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan
3. Kesiapan petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan dan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan pemeriksaan kapal di Pelabuhan Binaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Sasaran Strategis 6

Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di PPN

Pengembangan

IKU-09 - Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan

Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)

Menurut PP 27 tahun 2021 Bidang perikanan bahwa Awak Kapal Perikanan adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal Perikanan oleh pemilik atau operator Kapal Perikanan untuk melakukan tugas di atas Kapal Perikanan sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji. Dalam Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan Paragraf 1 Persyaratan Kerja di Kapal Perikanan Pasal 141 bahwa Setiap Awak Kapal Perikanan yang akan bekerja harus memenuhi persyaratan:

- a. berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan harus memiliki kartu identitas diri;
- b. memiliki buku pelaut Awak Kapal perikanan;
- c. memiliki Kompetensi;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. terdaftar sebagai peserta jaminan
- f. memiliki PKL; dan
- g. disijil.

Perjanjian Kerja Laut yang selanjutnya disingkat PKL adalah kesepakatan tertulis antara awak Kapal Perikanan dengan pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan atau Nakhoda atau agen awak Kapal Perikanan. Kemudian Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan adalah pengakuan terhadap keahlian untuk melakukan pekerjaan sebagai Awak Kapal Perikanan setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan untuk semua jenjang pendidikan dan pelatihan Awak Kapal Perikanan. Maka dari itu setiap awak kapal yang akan bekerja di kapal perikanan wajib melaksanakan pemenuhan awak kapal perikanan yang sesuai PP 27 Tahun 2021 tentang Bidang perikanan.

Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan merupakan indikator baru yang ada di tahun 2023. Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan merupakan syarat pemenuhan awak kapal yang bekerja di kapal perikanan. Target indikator ini pada tahun 2023 sebesar 20 persen dengan periode pengukuran tahunan.

Tabel 32. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 6		Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di PPN Pengambengan					
Indikator Kinerja – 9		Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)					
Tahun 2022		Tahun 2023		% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	Target Tahun 2023	Realisasi	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	% Realisasi thd Target Renstra
-	-	20	71	-	355	-	-

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator ***Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan*** memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Target tahun 2023 sebesar 20 persen dan realisasi tahun 2023 yaitu 71 persen. Tingkat ***Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan*** karena faktor antara lain :

1. Untuk pelayanan di pos pelayanan ppn pengambengan di benoa hal ini dikarenakan sudah menerapkan aturan dari Permen KP 33 terkait pengawakan kapal sehingga kapal kapal yang akan melaksanakan keberangkatan kapal akan melengkapi awak kapalnya dengan Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan yaitu kompetensi, sijiil, buku pelaut, PKL, asuransi dll
2. Pengguna jasa yang sebagian besar di benoa adalah perusahaan sehingga penerapan aturan sangat dimungkinkan
3. Komunikasi yang baik dan kerjasama dengan organisasi seperti ATLI (Asosiasi Tuna Longline Indonesia), ASPERTADU (ASOSIASI PERIKANAN TANGKAP TERPADU) dan KP3I (Kesatuan Pekerja Pelaut perikanan Indonesia) cabang bali terkait pemenuhan persyaratan awak kapal perikanan.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun lalu karena merupakan indikator baru pada tahun 2023

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2023 terhadap Renstra

Berdasarkan data tersebut, IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan Renstra karena merupakan indikator baru pada tahun 2023

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 33. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengambengan	Capaian PPN Prigi	Persentase
71	5,74	1236

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan mencapai 1236%. Yang menjadi kunci adalah Komunikasi yang baik dengan perusahaan, organisasi organisasi seperti KP3I, ATLI , Aspertadu dll dalam rangka penyampaian aturan kebijakan terkait pengawakan kapal perikanan sehingga hambatan hambatan dapat diminimalisir kemudian dukungan terkait sosialisasi sosialisasi dengan pengguna jasa yang cukup dan kesadaran pengguna jasa terhadap aturan yang dilakukan pemerintah

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan dalam pemenuhan awak kapal perikanan ini dipengaruhi oleh kesadaran dari pelaku usaha agar selalu mematuhi aturan yang berlaku dan komitmen dari ppn pengambengan untuk mendukung dan mencari solusi ketika hambatan dalam pelaksanaan aturan itu terjadi seperti kerjasama dengan lembaga yang mengeluarkan sertifikat pengawakan dan komunikasi dengan direktorat pengawakan di KAPI dalam pemenuhan aturan awak kapal perikanan , kegagalan yang terjadi biasanya karena memang kapal kapal masih tradisional kemudian kurangnya informasi terkait pemenuhan dokumen dan belum meratanya lembaga yang bisa mengeluarkan sertifikat awak kapal diseluruh Indonesia sehingga itu menjadi salah satu kendala serta pendekatan kepada pelaku usaha dalam menginformasikan aturan yang berlaku

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 34. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)
Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan	100%	13.000.000	13.000.000	13.000.000	-

SDM yang menunjang terlaksananya capaian Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan adalah Tim Kerja Kesyahbandaran sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai keberhasilan tersebut ada beberapa langkah langkah yang sudah dilakukan yaitu :

1. Komunikasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha, HNSI, Serikat pekerja (KP3I Cabang Bali), ATLI ASOSIASI TUNA LONGLINE INDONESIA terkait kebijakan pengawakan kapal perikanan
2. Menjaln komunikasi dengan lembaga yang mengeluarkan sertifikat pengawakan seperti Balai Balai Pelatihan dalam rangka pemenuhan sertifikat awak kapal
3. Komunikasi dan koordinasi dengan direktorat pengawakan KAPI terkait kendala kendala yang terjadi dalam pemenuhan pengawakan kapal perikanan
4. Komitemen ppn pengambengan yaitu syahbandar dalam melaksanakan aturan tersebut kepada kapal kapal yang akan melaksnaakan clearance

Sasaran Strategis 7

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan

IKU- 10 Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 4 (empat) indikator yakni (1) Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan; (2) Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan; (3) Nilai PM SKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan; (4) Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator yakni “*Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) PPN Pengembangan*” yang merupakan Hasil Penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) oleh Tim Penilai Internal (TPI)

Inspektorat Jenderal Bidang V Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 62/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tahapan yang dilakukan :

- a) Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Unit kerja yang akan dinilai;
- b) Pemantauan terhadap saran perbaikan dari hasil evaluasi;
- c) Penilaian terhadap dokumen yang disajikan berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) serta pengujian implementasi pembangunan zona integritas;
- d) Pleno penilaian oleh Tim Penilaian Internal (TPI) untuk menetapkan nilai akhir sebagai dasar memenuhi persyaratan untuk diusulkan mendapat predikat menuju WBK/WBBM;
- e) Pemantauan sebelum penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN);
- f) Pendampingan saat penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN).

Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK / WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Komponen penilaian terdiri atas 2 (dua) komponen dengan beberapa area perubahan

yakni sebagai berikut :

- (1) Komponen Proses/Pengungkit, mencakup 8 (delapan) area perubahan antara lain:
 - a. Manajemen Perubahan, dengan indikator penilaian: Tim Pembangunan ZI, Roadmap Pembangunan ZI, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI, Perubahan Pola Pikir dan budaya kinerja
 - b. Penataan Tata Laksana, dengan indikator penilaian : Proses bisnis dan SOP kegiatan utama, E-Government, Keterbukaan Informasi Publik
 - c. Penataan Sistem Manajemen Sumberdaya Manusia, dengan indikator penilaian : Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN, Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, Promosi jabatan dilakukan secara terbuka, Penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, Pelaksanaan evaluasi jabatan, Sistem informasi Kepegawaian,
 - d. Penguatan Akuntabilitas, dengan indikator penilaian : Keterlibatan pimpinan, Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja,
 - e. Penguatan Pengawasan, dengan indikator penilaian : Gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan masyarakat, Whistle Blowing System, Penanganan Benturan Kepentingan dan Pembangunan Zona Integritas, APIP
 - f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator penilaian : Standar pelayanan, Budaya pelayanan prima, Pengelolaan pengaduan dan Penilaian kepuasan terhadap pelayanan, Pemanfaatan teknologi Informasi
- (2) Komponen Hasil
 - a. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, dengan indikator penilaian : Nilai Persepsi Korupsi dan Opini BPK,
 - b. Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator penilaian : Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan

Tabel 35. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 7		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan					
Indikator Kinerja – 10		Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)					
Tahun 2022		Tahun 2023		% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	Target Tahun 2023	Realisasi	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	% Realisasi thd Target Renstra
45,10	80,75	45,10	80,75	100	100	75,07	107,56

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator *Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan* memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Target tahun 2023 sebesar 45,10 persen dan realisasi tahun 2023 yaitu 80,75 persen.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut, realisasi tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 100%. Realisasi tahun 2023 sebesar 80,75 sama dengan realisasi tahun 2022 sebesar 80,75.

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2023 terhadap Renstra

Berdasarkan data tersebut, indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Perikanan Nusantara Pengembangan tahun 2023 jika dibandingkan dengan target dalam renstra (2024) mencapai 107,56%.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional**Tabel 36. Perbandingan dengan Satker Lain**

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
80,75	91,37	88,37

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi,

capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan mencapai 88,37%.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan unsur penunjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam upaya pemerintah untuk mencapai *Good Governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Tujuan reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang professional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani public, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Telah dilakukan pemeriksaan dokumen WBK oleh ORTALA DJPT Pada tahun 2022. Upaya selanjutnya adalah terus melengkapi kelengkapan dokumen dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 37. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)
Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan	179%	13.235.000	5.700.000	23.696.813	17.996.813

Pada Tahun 2023, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan sebesar Rp 5.700.000,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 136%. SDM yang menunjang

terlaksananya capaian Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan adalah penanggung jawab masing-masing kriteria pada masing-masing tim sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi PPN Pengambangan yang merupakan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah diatur oleh Kemenpan RB dan telah diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal KKP.

IKU- 11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Persen)

Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan adalah Indikator baru pada Tahun 2023. Indikator ini mengacu pada jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan.

Target indikator ini pada tahun 2023 sebesar 75 persen dengan periode pengukuran triwulan.

Tabel 38. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 7		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengambangan					
Indikator Kinerja – 11		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Persen)					
Tahun 2022		Tahun 2023		% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	Target Tahun 2023	Realisasi	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	% Realisasi thd Target Renstra
-	-	75	97	-	129,33	-	-

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator *Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan* memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan sebesar 129,33 persen. Target tahun 2023 sebesar 75 persen dan realisasi tahun 2023 yaitu 97 persen.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun lalu karena merupakan indikator baru pada tahun 2023

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2023 terhadap Renstra

Berdasarkan data tersebut, IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan Renstra karena merupakan indikator baru pada tahun 2023

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 39. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengambangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
97	100	97

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan mencapai 97%.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

IKU ini dapat dilakukan apabila satker telah menindaklanjuti temuan yang telah dilakukan oleh ITJEN KKP dan melaksanakan saran yang telah diberikan. Aplikasi yang digunakan adalah Sidak KKP.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 40. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	129%	37.810.000	37.266.349	48.900.933	11.634.584

Pada Tahun 2023, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan sebesar Rp 37.266.349,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 31%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan adalah penanggung jawab masing-masing kriteria pada masing-masing tim dan operator Sidak sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan ini berupa pelaksanaan pelaporan tindak lanjut terhadap temuan oleh ITJEN KKP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan.

IKU - 12 Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)

Rekonsiliasi kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap adalah Proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk Meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja KKP, Menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi terhadap

perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan Sebagai sarana pendampingan terhadap Eselon II DJPT untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik. Terdapat 4 aspek penilaian diantaranya adalah Aspek Kepatuhan (Bobot 25%), Aspek Kesesuaian (Bobot 25%), Aspek Ketercapaian (Bobot 30%), dan Aspek Ketepatan (20%). Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan merupakan Indikator baru pada Tahun 2023. Pengukuran Indikator dilakukan secara tahunan.

Tabel 41. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 7		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan					
Indikator Kinerja – 12		Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)					
Tahun 2022		Tahun 2023		% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	Target Tahun 2023	Realisasi	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	% Realisasi thd Target Renstra
-	-	93	98,24	-	105,63	-	-

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator **Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan** memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Target tahun 2023 sebesar 93 dan realisasi tahun 2023 yaitu 98,24.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun lalu karena merupakan indikator baru pada tahun 2023

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2023 terhadap Renstra

Berdasarkan data tersebut, IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan Renstra karena merupakan indikator baru pada tahun 2023

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 42. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengambengan	Capaian PPN Prigi	Persentase
98,24	99,44	98,79

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan mencapai 98,79.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Adanya pemenuhan dokumen SAKIP setiap bulan serta dilakukan pemantauan secara berkala dan monitoring dan evaluasi setiap triwulan. Pemantauan dilakukan melalui rapat Kepala Pelabuhan dan Tim Pengelola Kinerja.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 43. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)
Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	106%	37.810.000	37.266.349	39.940.370	2.674.021

Pada Tahun 2023, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan sebesar Rp 37.266.349,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 7%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan adalah penanggung jawab masing-masing kriteria pada masing-masing tim dan operator KinerjaKaku sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang kinerja yaitu Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan informasi kinerja pada unit kerja dalam pengelolaan kinerja dan penganggaran sebagai dasar pemberian reward dan punishment. Mengintegrasikan aplikasi E- kinerja untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

IKU- 13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No.38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesional ASN KKP yang di ukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Realisasi IKU ini diukur dan dilaporkan berkala setiap bulan untuk ASN di setiap Subkor di PPN Pengambangan. IKU ini didukung oleh anggaran penyusunan administrasi perencanaan dan pengembangan SDM aparatur.

Indikator kinerja IKU ini adalah adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN.

Tabel 44. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengambangan		
Indikator Kinerja – 13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Indeks)		
Tahun 2022	Tahun 2023	% Capaian Terhadap	Renstra 2020-2024

Target	Realisasi	Target Tahun 2023	Realisasi	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	% Realisasi thd Target Renstra
79	81,52	82	89,73	110,07	109,42	79	113,58

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator *Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan* memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Target tahun 2023 sebesar 82 dan realisasi tahun 2023 yaitu 89,73.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut, realisasi tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 110,07%. Realisasi tahun 2023 sebesar 89,73 sedangkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 81,52.

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2023 terhadap Renstra

Berdasarkan data tersebut, indikator *Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan tahun 2023* jika dibandingkan dengan target dalam renstra (2024) mencapai 113,58 %.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 45. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengambangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
89,73	90,63	99

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan mencapai 99%.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator kinerja ini pada tahun 2023 telah mencapai target yang berupa kualifikasi yaitu Pendidikan. Kemudian kompetensi berupa Diklat 20JP, Seminar dan Diklat Fungsional, Kemudian penilaian SKP dan hukuman disiplin.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 46. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)
Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	109%	11.600.000	11.433.116	12.693.512	1.260.396

Pada Tahun 2023, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan sebesar Rp 11.433.116,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 11%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan adalah Tim Kerja Dukungan Manajerial bagian kepegawaian dan seluruh pegawai sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada tahun 2021 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN yang sudah ada dalam RKA-K/L yaitu kegiatan peningkatan, pengembangan dan pembinaan pegawai merupakan kegiatan yang menunjang kinerja.

Dalam penilaian kompetensi pejabat struktural lingkup UPT PPN Pengambengan, terdapat 12 komponen standar kompetensi yakni sebagai berikut :

(1) Integritas dengan kriteria : (a) Konsisten dan berpegang pada etika dan tata nilai organisasi yang berlaku, (b) Secara terbuka menyatakan pandangan tentang ketidak etisan meskipun hal itu akan merusak hubungan kerjanya, (c) Mengajak orang lain untuk membangun kepercayaan dan berkerja sesuai dengan etika organisasi yang berlaku, (d) Membangun pola cata kerja atau iklim kerja yang kondusif dengan memberikan suasana yang dapat menumbuhkembangkan saling percaya dan (e) Menjadi contoh bagi orang lain dalam bertindak/bekerja sesuai dengan nilai-nilai dan

etika kerja.

(2) Kepemimpinan dengan kriteria : (a) Memberikan Penjelasan Kepada Tim Kerja, (b) Melakukan bimbingan kepada tim kerja, (c) Pendelegasian tugas dan wewenang, (d) Pengorganisasian sumber daya yang ada dan (e) Membangun situasi yang kondusif.

(3) Perencanaan pengorganisasian dengan kriteria : (a) Mengetahui jenis kegiatan berdasarkan kebutuhan organisasi, (b) Menentukan skala prioritas kegiatan kemudian menentukan sumber daya yang diperlukan, (c) Memprediksi permasalahan dan menyusun tahapan penyelesaian masalah yang timbul, (d) Menggunakan penyelesaian secara sistematis dalam menghadapi masalah dan membuat alternatif-alternatif untuk meningkatkan kinerja dan (e) Merumuskan tindakan jangka panjang sesuai dengan tujuan organisasi.

(4) Kerjasama, dengan kriteria : (a) Bersikap pasif dalam kelompok. Mendukung tujuan dan keputusan kelompok dengan cara menyelesaikan tugas secara bersama. Berpartisipasi dengan cara memberikan kontribusi. Membantu rekan kerja/anggota tim yang mengalami kesulitan. Aktif memberikan semangat rekan/anggota tim untuk meningkatkan produktivitas kelompok.

(5) Fleksibilitas berpikir, dengan kriteria : (a) Tidak mampu menerima pandangan dari orang lain. Mengikuti alur pemikiran pandangan dari orang lain Berupaya mendapatkan pandangan dari berbagai pihak dalam menghadapi perubahan situasi. Membantu rekan kerja/anggota tim yang mengalami kesulitan. Aktif memberikan semangat rekan/anggota tim untuk meningkatkan produktivitas kelompok.

(6) Berorientasi pada kualitas, dengan kriteria : (a) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan, (b) Memperhatikan jalannya pelaksanaan tugas didukung dengan bahan yang benar, Mengamati prosedur kerja dengan cermat untuk mengantisipasi masalah yang timbul dan menetapkan standar kerja, (c) Membuat standar kerja baru untuk memperbaiki proses kerja agar efektif dan efisien. Mengawasi jalannya pekerjaan untuk menghindari kesalahan dengan membuat sistem pengawasan yang lebih efektif.

(7) Berorientasi pada pelayanan, dengan kriteria : (a) Memberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku Memberikan pelayanan secara tepat dan tepat sesuai kebutuhan pelanggan, (b) Mengevaluasi kebutuhan pelanggan untuk meningkatkan pelayanan, (c) Mengambil langkah-langkah antisipasi untuk memprediksi perubahan kebutuhan pelanggan. Mengembangkan metode baru dalam meningkatkan pelayanan.

(8) Manajemen Waktu dengan kriteria : (a) Melaksanakan pekerjaan yang sudah ada tanpa mempertimbangkan waktu yang disediakan, (b) Menyusun beberapa kegiatan yang akan dilakukan dengan menentukan batas waktu yang telah ditetapkan, (c) Memperkirakan jangka waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab, (d) Menyelesaikan tugas pekerjaan sesuai dengan batasan waktu yang diperlukan dan (e) Menentukan prioritas pekerjaan disesuaikan dengan target waktu yang ada.

(9) Pengambilan keputusan dengan kriteria : (a) Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, (b) Mengumpulkan informasi dan dukungan dari lingkungan dalam pengambilan keputusan, (c) Membuat keputusan penyelesaian masalah dengan telah mempertimbangkan konsekuensinya, (d) Menetapkan keputusan yang dapat mengakomodir kepentingan semua pihak dan (e) Memastikan pelaksanaan keputusan dengan memantau hasil-hasil dan membuat penyesuaian- penyesuaian yang diperlukan.

(10) Pengaturan kerja dengan kriteria : (a) Mengenali tugas/pekerjaan yang lebih penting dan kurang penting, (b) Memastikan perlengkapan yang terkait dengan pekerjaan telah tersedia sesuai kebutuhan, (c) Menyusun alokasi dan penggunaan waktu yang efektif untuk penyelesaian pekerjaan, (d) Mengkoordinasi antara perencanaan kerja orang lain dan diri sendiri untuk menghindari masalah dan (e) Memanfaatkan berbagai sumber yang daya yang ada secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah.

(11) Kepemimpinan strategis

(12) Membangun hubungan kerja strategis. Selain penilaian kompetensi juga ada penilaian terhadap tingkat kualifikasi pendidikan, kinerja serta disiplin yang artinya melihat pegawai apakah sudah pernah atau tidak pernah mendapat hukuman terkait kedisiplinan. Dari keempat komponen penilaian dihitung dengan membuat rata – rata yang menghasilkan indeks profesionalitas dari ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan.

IKU- 14 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Persen)

Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang dibutuhkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi,

harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Dalam proses pengadaan mengacu pada RUP (Rencana umum pengadaan) yang telah disusun.

Metode pengukuran Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut : 1. Rencana umum pengadaan telah di upload ke dalam aplikasi SIRUP (20%) 2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%) 3) Laporan penyelenggaraan Barang/Jasa 4) Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Tabel 47. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 7		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan					
Indikator Kinerja – 14		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)					
Tahun 2022		Tahun 2023		% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	Target Tahun 2023	Realisasi	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	% Realisasi thd Target Renstra
75	95	77,5	96,29	101,35	124,24	80	120,36

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator ***Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan*** memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan sebesar 124,24 %. Target tahun 2023 sebesar 77,5 persen dan realisasi tahun 2023 yaitu 96,29 persen.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut, realisasi tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 101,35%. Realisasi tahun 2023 sebesar 96,29 sedangkan realisasi tahun 2022 sebesar 95.

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2023 terhadap Renstra

Berdasarkan data tersebut, indikator ***Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan*** tahun 2023 jika dibandingkan dengan target dalam renstra (2024) mencapai 120,36%.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 48. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengambangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
96,29	98,35	97,90

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan mencapai 97,90%.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Metode pengukuran Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut : 1. Rencana umum pengadaan telah di upload ke dalam aplikasi SIRUP (20%) 2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%) 3) Laporan penyelenggaraan Barang/Jasa 4) Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%). Apabila seluruh unsur dapat memenuhi target yang telah ditentukan.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 49. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan	124%	16.320.000	16.320.000	20.276.810	3.956.810

Pada Tahun 2023, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan sebesar Rp 16.320.000,- Sedangkan efisiensi penggunaan

anggaran sebesar 24%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah Tim Kerja Dukungan Manajerial bagian pengadaan barang dan jasa sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan ini dapat ditunjang oleh penambahan SDM sebagai anggota Pokja sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja.

IKU- 15 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)

Pengelolaan BMN adalah kegiatan yang dilakukan secara baik dan profesional dalam pengelolaan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Metode pengukuran dari indikator ini adalah Tingkat pemanfaatan rencana kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (10%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%) 3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) tahun 2017-2019 (20%) 4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (25%) 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (20%)

Tabel 50. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 7		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan					
Indikator Kinerja – 15		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)					
Tahun 2022		Tahun 2023		% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	Target Tahun 2023	Realisasi	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	% Realisasi thd Target Renstra
75	87,5	77,5	87,5	100	112,90	80	109,37

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator *Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan* memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan sebesar 112,90%. Target tahun 2023 sebesar 77,5 persen dan realisasi tahun 2023 yaitu 87,5 persen.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut, realisasi tahun 2023 sama jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022%. Realisasi tahun 2023 dan 2022 sebesar 87,5 persen.

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2023 terhadap Renstra

Berdasarkan data tersebut, indikator *Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan* tahun 2023 jika dibandingkan dengan target dalam renstra (2024) mencapai 109,37%.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 51. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengambangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
87,5	95	92,10

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan mencapai 92,10%.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator ini dapat tercapai apabila operator aktif menginput dan mengupdate data pada aplikasi SMART KEMENKEU.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 52. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	113%	3.600.000	3.600.000	4.064.516	464.516

Pada Tahun 2023, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan sebesar Rp 3.600.000,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 13%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan adalah Tim Kerja Dukungan Manajerial bagian pengelola BMN dan persediaan dan jasa sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan diantaranya adalah menambah pengelola Barang Milik Negara untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang asset milik negara serta melaksanakan pelaporan asset secara tepat dan akurat.

IKU- 16 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Satker dalam rangka ketahanan fiscal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, PengelolaanUP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerpan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus

Pengukuran dan pelaporan indikator ini dilakukan setiap triwulannya dengan mengacu kepada realisasi keempat komponen yang dicantumkan pada **dashboard**

Om- SPAN Kementerian Keuangan.

Pada level I IKU ini di cascading ke Level II (ke semua seksi/subbag) dengan perhitungan secara bulanan dengan indikator sebagai berikut :

Tabel 53. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 7		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan					
Indikator Kinerja – 16		Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)					
Tahun 2022		Tahun 2023		% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	Target Tahun 2023	Realisasi	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	% Realisasi thd Target Renstra
89	96,46	93,75	96,40	99,93	102,82	89	108,31

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator *Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan* memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan sebesar 102,82%. Target tahun 2023 sebesar 93,75 dan realisasi tahun 2023 yaitu 96,40.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut, realisasi tahun 2023 menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 99,93%. Realisasi tahun 2023 sebesar 96,40 dan 2022 sebesar 96,46.

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2023 terhadap Renstra

Berdasarkan data tersebut, indikator *Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan* tahun 2023 jika dibandingkan dengan target dalam renstra (2024) mencapai 108,31%.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 54. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengambengan	Capaian PPN Prigi	Persentase
96,40	94,64	101,85

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan mencapai 101,85 %.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator kinerja ini pada tahun 2022 ditentukan oleh 13 (tiga belas) indikator diantaranya : Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Penyampaian Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, Penyampaian LPJ Bendahara, Dispensasi Penyampaian SPM, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Capaian Output, Retur SP2D, Pengembalian Surat Perintah Membayar dan Perencanaan Kas.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 55. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	103%	119.900.000	116.868.601	123.289.173	6.420.572

Pada Tahun 2023, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan sebesar Rp 116.868.601,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 5%. SDM yang menunjang terlaksananya Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan adalah Tim Kerja Dukungan Manajerial bagian perencanaan, keuangan dan operator

Sakti dan jasa sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada tahun 2023 Nilai IKPA dapat mencapai 100% apabila terdapat Kerjasama yang baik antar seluruh pihak serta melakukan monitoring dan evaluasi melalui rapat koordinasi

IKU-17 Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)

Nilai kinerja anggaran merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerjadan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Adapun aspek yang dinilai adalah aspek implementasi yang terdiri atas 4 (empat) komponen yakni

- (1) Penyerapan Anggaran (P) dengan bobot 9,7 persen
- (2) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi (K) dengan bobot 18,2 persen,
- (3) Pencapaian keluaran (PK) dengan bobot 43,5 persen dan
- (4) Efisiensi (E) dengan bobot 28,6 persen. Adapun pengelompokan hasil penilaian adalah sebagai berikut :
 - a. Nilai Kinerja Anggaran > 90 persen 100 persen dikategorikan **Sangat Baik**;
 - b. Nilai Kinerja Anggaran > 80 persen 90 persen dikategorikan **Baik**;
 - c. Nilai Kinerja Anggaran > 60 persen 80 persen dikategorikan **Cukup** atau **Normal**;
 - d. Nilai Kinerja Anggaran > 50 persen 60 persen dikategorikan **Kurang**;
 - e. Nilai Kinerja Anggaran 50 persen dikategorikan **Sangat Kurang**;

Tabel 56. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 7		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan					
Indikator Kinerja – 17		Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)					
Tahun 2022		Tahun 2023		% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	Target Tahun 2023	Realisasi	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	% Realisasi thd Target Renstra
86	86,05	82	86,76	100,82	105,80	87	99,72

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator *Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan* memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan sebesar **105,80%**. Target tahun 2023 sebesar 82 dan realisasi tahun 2023 yaitu 86,76.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut, realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 100,82%. Realisasi tahun 2023 sebesar 86,76 dan 2022 sebesar 82.

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2023 terhadap Renstra

Berdasarkan data tersebut, indikator *Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan* tahun 2023 jika dibandingkan dengan target dalam renstra (2024) mencapai 99,72 %.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 57. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
86,76	86,21	100,63

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai 100,63 %.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

IKU ini dapat dilakukan apabila operator menginput data pada aplikasi SMART DJA secara teratur setiap bulan. Pengisian data berupa input capaian Realisasi Volume kegiatan (RKV)

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 58. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)
Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	106%	37.200.000	36.499.802	39.359.415	2.859.613

Pada Tahun 2023, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan sebesar Rp 36.499.802,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 8%. SDM yang menunjang terlaksananya Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan adalah Tim Kerja Dukungan Manajerial bagian perencanaan, keuangan dan operator Sakti dan jasa sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan ini berupa monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengelolaan Ditjen Perikanan Tangkap dan merupakan kegiatan penunjang untuk tercapai IKU.

IKU-18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Indeks)

Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan merupakan indikator baru yang ada di tahun 2023. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan

melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Target indikator ini pada tahun 2023 sebesar 88,21 dengan periode pengukuran tahunan.

Tabel 59. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 7		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan					
Indikator Kinerja – 18		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)					
Tahun 2022		Tahun 2023		% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	Target Tahun 2023	Realisasi	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	% Realisasi thd Target Renstra
-	-	88,21	89,08	-	100,98	-	-

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Target tahun 2023 sebesar 88,21 dan realisasi tahun 2023 yaitu 89,08.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun lalu karena merupakan indikator baru pada tahun 2023

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2023 terhadap Renstra

Berdasarkan data tersebut, IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan Renstra karena merupakan indikator baru pada tahun 2023

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 60. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
89,08	90,11	98,85

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan mencapai 98,85%.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat terdapat unsur pelayanan yang digunakan sebagai acuan penilaian, yaitu (1) persyaratan, adalah syarat yang harus dipenuhi baik persyaratan teknis maupun administratif; (2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan dalam pelayanan; (3) Waktu Penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan; (4) Biaya/Tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan; (5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; (6) Kompetensi Petugas, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh petugas seperti pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman; (7) Perilaku Petugas, adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan; (8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut; dan (9) Sarana dan Prasarana, adalah alat dan penunjang utama terselenggaranya suatu proses dalam pelayanan. Dengan dilakukannya SKM dengan penilai kesembilan unsur diatas maka dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta dapat diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan dan nantinya dapat digunakan sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 61. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan	101%	20.765.000	20.725.505	20.969.802	244.297

Perikanan Nusantara Pengembangan					
--	--	--	--	--	--

Pada Tahun 2023, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebesar Rp 20.725.505,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah penanggung jawab masing-masing kriteria pada masing-masing tim dan operator Si Susan sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pelaksanaan SKM dilakukan sepanjang tahun kegiatan dan dilaporkan hasilnya setiap triwulan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pelayanan publik yaitu dilaksanakan perbaikan terhadap fasilitas sarana dan prasarana pelayanan, dan peningkatan kompetensi petugas pelayanan melalui bimbingan teknis. Tidak hanya itu, kegiatan lain yang telah dilaksanakan yaitu sosialisasi mengenai prosedur pelayanan dan standar pelayanan terhadap pengguna jasa

B. Akuntabilitas Keuangan

Pada 2023 ini Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mendapatkan alokasi anggaran APBN sebesar **18.125.313.000,-** yang diperoleh untuk menjalankan kegiatan yang telah disusun yakni sebagai berikut :

Tabel 62. Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan TA 2023

KODE AKUN	URAIAN	PAGU	TARGET TW 4	
			TARGET	% TARGET PAGU
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	7.405.475.000	7.405.475.000	100,00%
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan	321.680.000	321.680.000	100,00%

	Pengawakan Kapal Perikanan			
2337.ACA	Perizinan Produk [Base Line]	297.480.000	297.480.000	100,00%
2337.ACA.001	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	297.480.000	297.480.000	100,00%
2337.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat [Base Line]	13.000.000	13.000.000	100,00%
2337.BDC.001	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan	13.000.000	13.000.000	100,00%
2337.PCA	Perizinan Produk[Base Line]	11.200.000	11.200.000	100,00%
2337.PCA.001	Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan	11.200.000	11.200.000	100,00%
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	7.023.975.000	7.023.975.000	100,00%
2338.BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi [Base Line]	3.516.525.000	3.516.525.000	100,00%
2338.BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	2.663.925.000	2.663.925.000	100,00%
2338.BGA.004	Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya	852.600.000	852.600.000	100,00%
2338.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan[Base Line]	717.800.000	717.800.000	100,00%
2338.RAL.001	Sarana pelabuhan perikanan mendukung pelaksanaan PIT dan PNBK Perikanan Tangkap yang disediakan	717.800.000	717.800.000	100,00%
2338.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan[Base Line]	2.789.650.000	2.789.650.000	100,00%
2338.RBQ.001	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasilitasnya	2.594.650.000	2.594.650.000	100,00%

	untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur			
2338.RBQ.003	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan	195.000.000	195.000.000	100,00%
2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	8.000.000	8.000.000	100,00%
2339.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat [Base Line]	8.000.000	8.000.000	100,00%
2339.QDC.003	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	8.000.000	8.000.000	100,00%
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	51.820.000	51.820.000	100,00%
2341.QKB	Pemantauan produk [Base Line]	51.820.000	51.820.000	100,00%
2341.QKB.001	Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	51.820.000	51.820.000	100,00%
032.03.WA	Program Dukungan Manajemen	10.719.838.000	10.719.838.000	100,00%
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	10.719.838.000	10.719.838.000	100,00%
2342.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi [Base Line]	86.600.000	86.600.000	100,00%
2342.CAN.955	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	86.600.000	86.600.000	100,00%
2342.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]	10.241.728.000	10.241.728.000	100,00%
2342.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	34.000.000	34.000.000	100,00%
2342.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	16.000.000	16.000.000	100,00%
2342.EBA.994	Layanan Perkantoran	10.191.728.000	10.191.728.000	100,00%
2342.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line]	125.000.000	125.000.000	100,00%
2342.EBB.951	Layanan Sarana Internal	125.000.000	125.000.000	100,00%

2342.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal [Base Line]	49.410.000	49.410.000	100,00%
2342.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	49.410.000	49.410.000	100,00%
2342.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line]	217.100.000	217.100.000	100,00%
2342.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	60.000.000	60.000.000	100,00%
2342.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	37.200.000	37.200.000	100,00%
2342.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	119.900.000	119.900.000	100,00%

Dari pagu anggaran tersebut di atas, realisasi keuangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2023 dalam rangka mendukung pelaksanaan program- program kegiatannya telah terealisasi sebesar Rp. Rp 17.876.690.119- atau 98,63 % dari total pagu pada Tahun 2023.

Tabel 63. Realisasi Keuangan PPN Pengembangan s/d Triwulan IV Tahun 2023

KODE AKUN	URAIAN	PAGU	REALISASI TW 4		
			REALISASI	% TARGET	% PAGU
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	7.405.475.000	7.235.993.831	97,71%	97,71%
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	321.680.000	316.290.084	98,32%	98,32%
2337.ACA	Perizinan Produk [Base Line]	297.480.000	292.090.084	98,19%	98,19%
2337.ACA.001	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	297.480.000	292.090.084	98,19%	98,19%
2337.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat [Base Line]	13.000.000	13.000.000	100,00%	100,00%
2337.BDC.001	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan	13.000.000	13.000.000	100,00%	100,00%

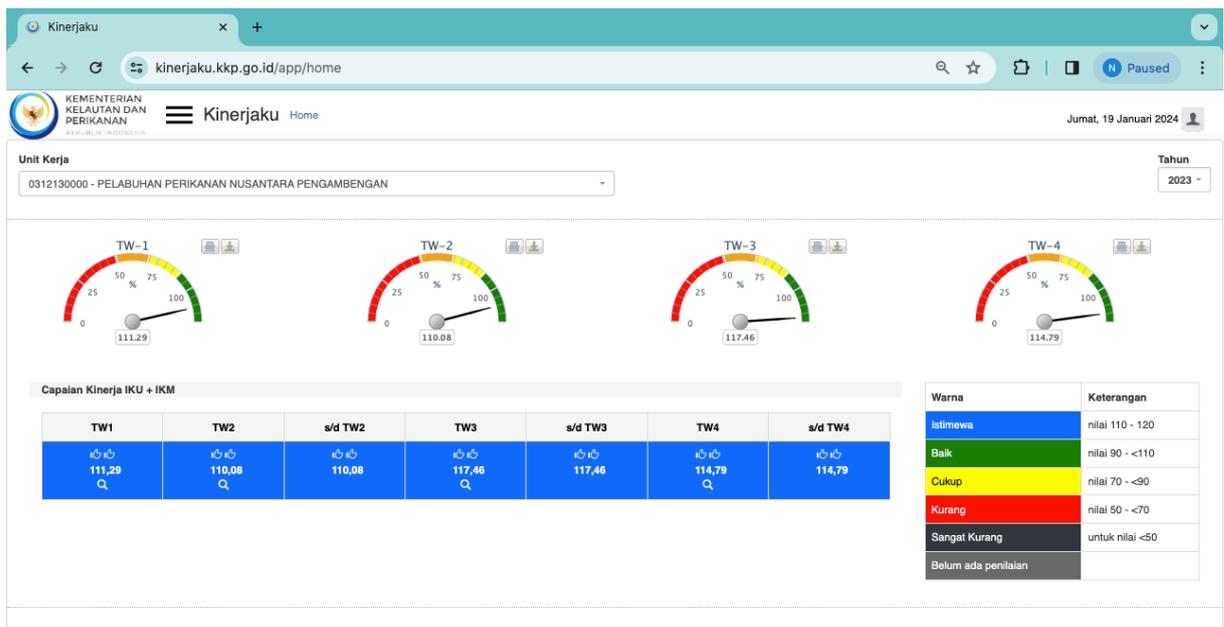
2337.PCA	Perizinan Produk [Base Line]	11.200.000	11.200.000	100,00%	100,00%
2337.PCA.001	Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan	11.200.000	11.200.000	100,00%	100,00%
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	7.023.975.000	6.875.807.699	97,89%	97,89%
2338.BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi [Base Line]	3.516.525.000	3.431.466.028	97,58%	97,58%
2338.BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	2.663.925.000	2.590.591.028	97,25%	97,25%
2338.BGA.004	Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya	852.600.000	840.875.000	98,62%	98,62%
2338.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan [Base Line]	717.800.000	708.692.815	98,73%	98,73%
2338.RAL.001	Sarana pelabuhan perikanan mendukung pelaksanaan PIT dan PNBK Perikanan Tangkap yang disediakan	717.800.000	708.692.815	98,73%	98,73%
2338.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan [Base Line]	2.789.650.000	2.735.648.856	98,06%	98,06%
2338.RBQ.001	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	2.594.650.000	2.554.706.441	98,46%	98,46%
2338.RBQ.003	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan	195.000.000	180.942.415	92,79%	92,79%
2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	8.000.000	7.000.000	87,50%	87,50%
2339.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat [Base Line]	8.000.000	7.000.000	87,50%	87,50%
2339.QDC.003	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	8.000.000	7.000.000	87,50%	87,50%

2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	51.820.000	36.896.048	71,20%	71,20%
2341.QKB	Pemantauan produk[Base Line]	51.820.000	36.896.048	71,20%	71,20%
2341.QKB.001	Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	51.820.000	36.896.048	71,20%	71,20%
032.03.WA	Program Dukungan Manajemen	10.719.838.000	10.640.696.288	99,26%	99,26%
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	10.719.838.000	10.640.696.288	99,26%	99,26%
2342.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi [Base Line]	86.600.000	86.434.100	99,81%	99,81%
2342.CAN.955	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	86.600.000	86.434.100	99,81%	99,81%
2342.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]	10.241.728.000	10.170.307.482	99,30%	99,30%
2342.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	34.000.000	26.425.505	77,72%	77,72%
2342.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	16.000.000	6.731.200	42,07%	42,07%
2342.EBA.994	Layanan Perkantoran	10.191.728.000	10.137.150.777	99,46%	99,46%
2342.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line]	125.000.000	124.997.480	100,00%	100,00%
2342.EBB.951	Layanan Sarana Internal	125.000.000	124.997.480	100,00%	100,00%
2342.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal [Base Line]	49.410.000	48.699.465	98,56%	98,56%
2342.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	49.410.000	48.699.465	98,56%	98,56%
2342.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line]	217.100.000	210.257.761	96,85%	96,85%
2342.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	60.000.000	56.889.358	94,82%	94,82%
2342.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	37.200.000	36.499.802	98,12%	98,12%
2342.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	119.900.000	116.868.601	97,47%	97,47%

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2023 menyajikan capaian strategis organisasi yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan target sebesar Rp. 18.125.313.000- yang terealisasi sebesar, Rp 17.876.690.119- atau 98,63 % dari total pagu pada Tahun 2023. Sedangkan secara kinerja dengan hasil capaian sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dan dapat memenuhi target dengan Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambahkan dengan Nilai Indikator Kinerja (IK) sebesar **114,79%**. (Sesuai dashboard pada Aplikasi Kinerjaku pada Gambar 3)



Gambar 3. Dashboard pada aplikasi Kinerjaku Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Triwulan IV Tahun 2023

Dari hasil pengukuran kinerja Ditjen Perikanan Tangkap dan UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan s/d Tahun 2023 melalui pencapaian target indikator kinerja yang di input ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh hasil indikator yang memenuhi target yaitu sebagai berikut :

1. IKS.01.01 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Rp Juta)
2. IKS.02.02 Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengambangan (Ton)
3. IKS.03.01 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengambangan (Persen)
4. IKS.03.02 Tingkat Kinerja PPN Pengambangan (Nilai)
5. IKS.03.03 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Persen)
6. IKS.04.01 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Persen)
7. IKS.04.02 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Nilai)
8. IKS.05.01 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)
9. IKS.06.01 Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)
10. IKS.07.01 Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Nilai)
11. IKS.07.02 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Persen)
12. IKS.07.03 Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Nilai)
13. IKS.07.04 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Indeks)
14. IKS.07.05 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Persen)
15. IKS.07.06 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Persen)
16. IKS.07.07 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Nilai)

17. IKS.07.08 Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
18. IKS.07.09 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan pencapaian indikator kinerja sebagaimana pada Bab II di atas, hal – hal yang dapat disarankan untuk perbaikan pengelolaan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut :

- a) Memaksimalkan segala potensi-potensi SDM serta sarana prasarana yang telah dimiliki untuk mencapai target yang ditentukan.
- b) Memaksimalkan anggaran yang dimiliki untuk mencapai output sesuai dengan program yang telah dicanangkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2023 ini disampaikan sebagai tolak ukur kinerja pelabuhan dan bahan kajian evaluasi serta koreksi dalam rangka pembangunan dan pengembangan unit kerja di masa yang akan datang.